

# 2017 LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG  
KOORDINASI  
SDM, IPTEK DAN  
BUDAYA MARITIM



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN



# LAPORAN KINERJA 2017



**DEPUTI SDM, IPTEK DAN BUDAYA MARITIM**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Deputy SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman periode Juli - September Tahun Anggaran 2017.

Laporan ini merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang merupakan target kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia IPTEK dan Budaya Maritim yang meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Koordinasi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Koordinasi Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim, Koordinasi Bidang Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari, dan Koordinasi Bidang Jejaring Inovasi Maritim.

Terlaksananya target kinerja dan selesainya pembuatan Laporan Kinerja ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak atas partisipasinya dalam penyusunannya.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan demi peningkatan kualitas pelaporan kedepannya. Semoga.

Jakarta, Januari 2018

Deputy Bidang Koordinasi  
SDM, Iptek dan Budaya  
Maritim



Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sumberdaya Manusia .....	7
E. Aspek Strategis .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	15
3.1.1. Jumlah rumusan kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang Dihasilkan .....	17
3.1.2. Persentase rekomendasi kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti.....	32
3.1.3. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya maritim yang dilaksanakan para pemangku kebijakan .....	37
3.1.4. Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim .....	39
3.1.5. Peserta yang berpartisipasi dalam program peningkatan wawasan kemaritiman (revolusi mental) .....	47
3.1.6. Jumlah Event Nasional Wisata yang Dikoordinasikan (Revolusi Mental) .....	50
3.1.7. Jumlah Peserta yang Terlibat dalam Gerakan Aksi Bersih (Revolusi Mental) .....	58
3.1.8. Dukungan Kesekretariatan.....	61
3.2. Realisasi Anggaran.....	62
<b>BAB. IV. PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah SDM Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Berdasarkan Status Kepegawaian 3 .....	7
Tabel 2.	Jumlah SDM Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Berdasarkan Status Kepegawaian .....	8
Tabel 3.	Perjanjian dan Target Kinerja Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Tahun 2017 .....	11
Tabel 4.	Capaian Kinerja Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim 2017 .....	15
Tabel 5.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang Dihasilkan Lingkup Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim. ....	17
Tabel 6.	Persentase rekomendasi kebijakan D4 yang menjadi dasar penerbitan kebijakan pemangku kepentingan (yang ditindaklanjuti) .....	32
Tabel 7.	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim .....	39
Tabel 8.	Daftar Sekolah Percontohan Implementasi Kurikulum Kemaritiman di 12 Provinsi .....	41
Tabel 9.	Rangkaian Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Sail Sabang 2017 .....	42
Tabel 10.	Kementerian/Lembaga, komunitas serta pemda yang melaksanakan aksi bersih Sepanjang Tahun 2017 .....	44
Tabel 11.	Rangkaian Kegiatan Sail Sabang 2017 .....	57
Tabel 12.	Capaian Pelaksanaan Sail Sabang 2017 .....	58
Tabel 13.	Persentase Target dan Realisasi sekretariat Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim 2017 .....	62
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Per Asisten Deputi Lingkup Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim 2017 .....	63
Tabel 15.	Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Mulai Tahun 2015 - 2017 .....	64
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi 2016 dan 2017 .....	65
Tabel 17.	Output dan Mitra terkait Kebijakan Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2017 .....	67

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait. Untuk menjalankan tanggungjawab tersebut dibutuhkan langkah-langkah strategis dan kinerja optimal dalam mengkoordinasikan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan inovasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan dan apresiasi terhadap budaya, seni dan olah raga maritim serta memaksimalkan jejaring inovasi maritime melalui fungsi yang dijalankannya. Pengoordinasian dan penyusunan kebijakan membutuhkan kemitraan yang baik dari berbagai elemen pemerintahan, kementerian/lembaga terkait, level pemerintahan baik di pusat maupun daerah, stakeholders terkait seperti BUMN, swasta, organisasi non pemerintah maupun masyarakat.

Pada tahun ke-3 sejak terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim terus berbenah dalam memainkan peran strategis yang telah diamanatkan sesuai dengan Renstra 2016-2019. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 selain melanjutkan program yang telah ada pada tahun sebelumnya juga lebih diarahkan dalam rangka mendukung program yang ada dalam RPJMN 2014-2019, prioritas nasional dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKP 2017. Program penugasan kementerian seperti pelaksanaan revolusi mental terkait Gerakan Indonesia Bersih, peningkatan wawasan kemaritiman, penguatan karakter dan budaya maritime, pengembangan KSPN tetap dilaksanakan seperti tahun sebelumnya.

Perpres No 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia menjelaskan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. PMD adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, berkontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan sesuai kepentingan nasional. Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim mempunyai tugas pada misi membangkitkan wawasan dan identitas bahari dan meningkatkan kualitas SDM dan Iptek Kelautan.

Untuk itu, penguatan SDM, Iptek dan Budaya Bahari didorong melalui kebijakan yang terkait isu :

- a) Peningkatan **kualitas Pendidikan dan Pelatihan Maritim;**

- b) **Pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan** terkini secara terintegrasi;
- c) Membangun **kemandirian industri** maritim nasional;
- d) Peningkatan **kegiatan litbang**;
- e) Peningkatan **apresiasi seni dan budaya bahari**;
- f) Menumbuh kembangkan **olahraga bahari** ;
- g) Memperkuat jejaring **inovasi maritim**.

Sebagaimana amanat Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, pembangunan nasional mencakup 3 (tiga) dimensi yakni 1) Dimensi pembangunan manusia, 2) Dimensi pembangunan sector unggulan dan 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dalam menjabarkan ketiga dimensi pembangunan tersebut, program kegiatan Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim pada tahun 2017 diarahkan pada 7 prioritas nasional dan 11 program prioritas (lampiran 2).

Pembangunan Sumberdaya Manusia diarahkan pada gerakan revolusi mental dan pendidikan kemaritiman yang mendorong dan meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda, peduli dan menjadi garda terdepan dengan hadir di pulau-pulau terpencil, meningkatkan kesetiakawanan dan kerja keras. Pembangunan sektor unggulan diantaranya kemaritiman dan kelautan guna mendorong konektivitas laut dan dan industri maritim seperti industri perikanan, rehabilitasi pesisir dan wisata bahari. Selain itu, pengembangan kawasan industri dan strategis sera KEK, mendorong kedaulatan energi dan ketenaga listrikan termasuk energi baru dan terbarukan terutama energi arus laut. Sedangkan untuk mendukung terjadinya pemerataan dan pembangunan kewilayahan berperan dalam hal konektivitas nasional terkait pengembangan pelayaran rakyat.

#### **D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Keritiman Nomor 1 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kemaritiman.

Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang SDM, Iptek dan Budaya maritime
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yan terkait dengan isu Sumberdaya Manusia, Iptek dan budaya maritime
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan maritime
4. Koordinasi perumusan kebijakan dan pengendalian pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritime
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan jejaring inovasi maritime
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pegendalian pelaksanaan kebijakan budaya, seni dan olahraga bahari
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian system observasi kelautan, pengeolahan data dan informasi maritime
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator

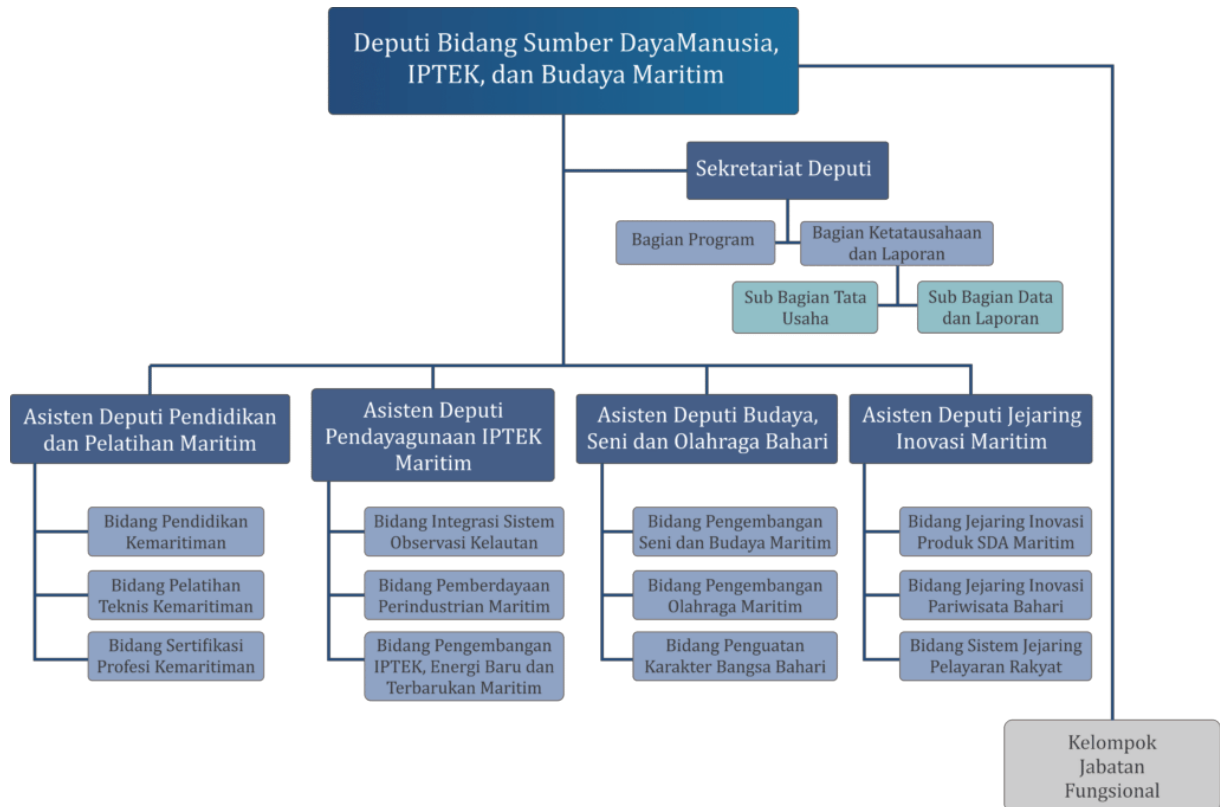
Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim membawahi Eselon II yang terdiri atas:

1. Sekretriati Deputi
2. Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim c. Asisten Deputi Pendayagunaan Iptek Maritim
3. Asisten Deputi Olahraga, Seni dan Budaya maritime
4. Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim
5. Kelompok Jabatan Fungsional



## D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim didukung oleh 5 (lima) unit eselon II yang terdiri dari 4 (empat) Asisten Deputy dan satu Sekretaris Deputy, sebagaimana ditampilkan pada diagram di bawah ini:



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim

Tugas fungsi setiap unit eselon 2 lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahuan & Teknologi dan Budaya Maritim dijelaskan sebagai berikut :

### D) Sekretariat Deputy

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan kegiatan serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran deputi b) Pengelolaan sistem informasi
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi deputi.
- c. Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan
- d. Penyusunan data dan laporan, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi

## 2) Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim

Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penentuan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan pelatihan maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman dan sertifikasi profesi kemaritiman; dan
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan
- c. kegiatan di bidang pendidikan kemaritiman, pelatihan teknis kemaritiman dan sertifikasi profesi kemaritiman.

## 3) Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim

Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penentuan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang integrasi sistem observasi kelautan, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang
- c. Terkait isu di bidang integrasi sistem observasi maritim, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim.
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang integrasi sistem observasi maritim, pemberdayaan perindustrian maritim, dan pengembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi energi baru dan terbarukan maritim.
- e. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta
- f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan data dan informasi maritim.

#### 4) Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari

Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian Lembaga yang taaerkaita dengan isu di bidang Budaya, Seni dan Olahraga Bahari.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olahraga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang

- c. terkait isu di bidang pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olahraga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan
- e. Kegiatan di bidang pengembangan seni dan budaya bahari, pengembangan olahraga maritim dan penguatan karakter bangsa bahari.

#### 5) Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim

Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian. Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan Jejaring Inovasi Maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Jejaring Inovasi Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jejaring inovasi produk sumberdaya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata bahari dan jejaring inovasi pelayaran rakyat; dan
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan
- c. kegiatan di bidang jejaring inovasi produk sumberdaya alam maritim, jejaring inovasi pariwisata bahari dan jejaring inovasi pelayaran rakyat.

#### D. SUMBERDAYA MANUSIA

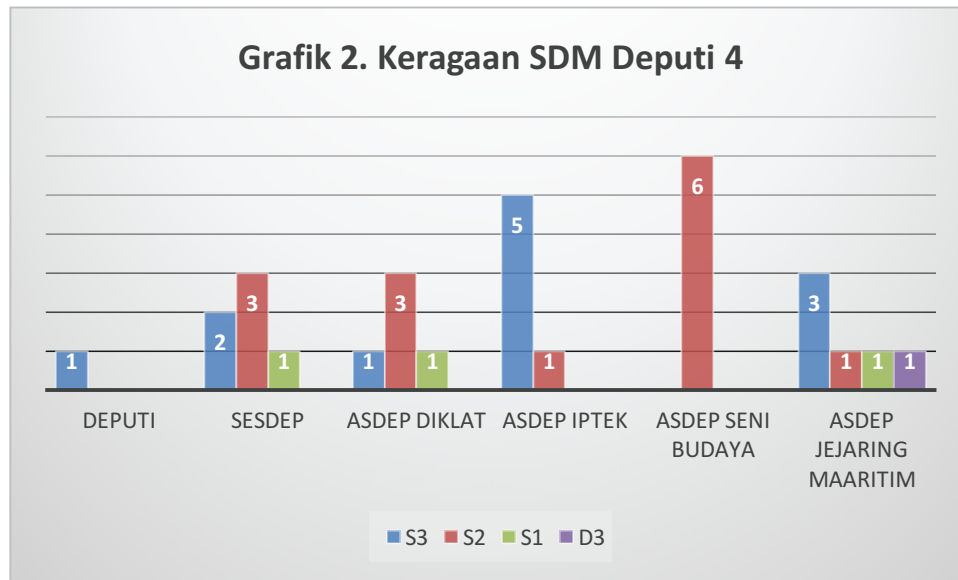
Pada tahun 2016 Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim didukung oleh 45 orang staf, yang terdiri dari 30 staf PNS dan 15 staf non-PNS. Sedangkan distribusi staf dalam unit eselon II sebagaimana digambarkan pada beberapa tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah SDM Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Unit Kedeputian	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	Deputi	1		1
2	Sekretariat Deputi	7	7	14
3	Asisten Deputi Bidang Diklat Maritim	5	2	7
4	Asisten Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek	5	2	7
5	Asisten Deputi Bidang Seni Budaya dan Olahraga Bahari	5	2	7
6	Asisten Deputi Bidang Jejaring Inovasi Maritim	5	2	7
	<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>43</b>

Tabel 2. Jumlah SDM Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kedeputian	Jumlah (org)	Tingkat Pendidikan			
			S3	S2	S1	D3
1	Deputi	1	1			
2	Sekretariat Deputi	7	2	3	1	
3	Asisten Deputi Bidang Diklat Maritim	5	1	3	1	
4	Asisten Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Maritim	5	3	2		
5	Asisten Deputi Bidang Seni Budaya dan Olahraga Bahari	5		5		
6	Asisten Deputi Bidang Jejaring Inovasi Maritim	6	3	1	1	1



Gambar 3. Keragaan Sumberdaya Manusia Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim 2017

Dari table dan grafik di atas didapatkan gambaran bahwa jumlah PNS sampai tahun 2017 sebanyak 28 orang dengan tingkat pendidikan PNS rata-rata magister sebanyak 46 persen. Jumlah PNS yang memiliki jenjang pendidikan S3 sebanyak 40 persen, S1 sebanyak 10 persen dan D3 sebanyak 3 persen.

### E. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim mengacu pada isu-isu strategis dan mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dan Kebijakan Kelautan Indonesia diantaranya:

1. Penguatan pendidikan dan pelatihan kemaritiman;
2. Pendayagunaan iptek maritim;
3. Pengembangan seni, budaya, dan olahraga maritim;
4. Perluasan dan penguatan jejaring inovasi maritim;

Selain itu, terdapat penugasan tambahan yang merupakan amanah dari Revolusi Mental terkait dengan wawasan kemaritiman, Inpres Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Indonesia Bersih melalui GBBS, serta dukungan event bertaraf internasional. Kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Penyelenggaraan Ekspedisi Nusantara Jaya 2017
2. Koordinasi Kegiatan Sail Banda 2017
4. Sosialisasi Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Melalui Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS)

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim mengacu pada Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Muatan dalam pelaporan kinerja diantaranya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Outline atau sistematika pelaporan dapat digambarkan sebagai berikut:

### **Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)**

*Executive summary* menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2017.

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan hal-hal umum terkait Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim dan juga uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LAKIP.

### **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai program, sasaran dan kebijakan Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2015 - 2019, rencana kerja dan anggaran tahun 2016, penetapan kinerja Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim serta pengukuran/pengelolaan kinerja Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.

### **Bab IV Penutup**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dan dievaluasi per triwulan. Rencana dan target kinerja Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim sampai pada Triwulan IV tahun 2017 dapat digambarkan dalam table di bawah ini.

Tabel 3. Perjanjian dan Target Kinerja Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
<i>Customer Perspektif</i>			
1	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang dapat diimplementasikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang menjadi dasar Penerbitan Kebijakan para Pemangku Kepentingan (yang ditindaklanjuti)	50%
2	Terlaksananya Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang efektif	Persentase Rekomendasi hasil Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya maritim yang dilaksanakan para Pemangku Kebijakan	50%
<i>Internal Process Perspektif</i>			
3	Tersedianya Formulasi hasil Koordinasi/Sinkronisasi Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Jumlah Rumusan/Formulasi Kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya maritim yang dihasilkan	8 Kebijakan
4	Tersedianya Rekomendasi hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Jumlah Rekomendasi hasil pengendalian Pelaksanaan Kebijakan bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	4 Kebijakan
5	Terselenggaranya Aksi/Kegiatan Pengembangan Wawasan Kemaritiman (Revolusi Mental di bidang Kemaritiman)	Peserta yang Berpartisipasi dalam Program Peningkatan Wawasan Kemaritiman	4000 Orang
		Jumlah Event Nasional Wisata yang dikoordinasikan	5 event
		Jumlah Peserta yang terlibat dalam Gerakan Aksi Bersih	5000 Orang



<i>Learning and Growth Perspektif</i>			
6	Terwujudnya <i>good governance</i>	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	≥ 60
7	Terkelolanya Anggaran secara optimal	Persentase penyerapan Anggaran	≥ 90%

## A. Rencana Strategis

Dasar pertimbangan dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam mengupayakan terwujudnya pembangunan nasional di bidang kemaritiman merujuk pada RPJMN 2015-2019 tentang Visi, Misi, Sembilan Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Sasaran Pembangunan Nasional di Bidang Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan, serta kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi lima tahun kedepan tersebut sebagai maka Visi Kedeputan Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim adalah sebagai berikut:

### 2.1 VISI

#### **“Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim”**

Visi Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim mendukung visi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang merupakan salah satu unsur eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang menjadikan visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Responsibility (PIKIR). Nilai-nilai dasar organisasi ini akan memberikan keyakinan kepada semua sumberdaya manusia yang ada bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan khususnya pengembangan bidang koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim.

Visi Kedeputan SDM, IPTEK dan Budaya Maritim mempunyai makna tentang koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yaitu merupakan proses mengupayakan terjadinya kesamaan persepsi, pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Sedangkan pengendalian merupakan bagian proses koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang penekanannya pada setiap pusat-pusat

pertanggungjawaban diupayakan dapat mewujudkan tujuan organisasi sesuai rencana dan dilakukan secara efektif dan efisien.

Adapun makna kata efektif dan berkelanjutan mempunyai arti sebagai berikut. Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai dapat berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi yang sesuai dengan peran Kedeputian SDM, Iptek dan Budaya Maritim, adalah sebagai berikut:

**“Menjaga dan Memperbaiki Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan, Serta Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kemaritiman di Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim”**

Misi ini merupakan langkah peran fungsi Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, dalam mengupayakan dan memastikan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yaitu “Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa bahari yang berdaulat dan berkarakter budaya nusantara” dan lebih lanjut Misi Presiden antara lain “Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. Pelaksanaannya misi diwujudkan melalui kinerja lintas sektor di bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim.

## **2.2. Sasaran Strategis**

Secara umum, sasaran strategis Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim adalah:

- 1) Terwujudnya sinergitas sistem pendidikan dan pelatihan maritim yang berkualitas
- 2) Terwujudnya pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan bidang kemaritiman;
- 3) Terciptanya apresiasi seni dan budaya bahari serta berkembangnya olah raga bahari; dan
- 4) Terbentuknya sistem inovasi maritim melalui jejaring pemangku kepentingan

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan dengan mendorong sinergi antar sector, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, termonitornya

implementasi kebijakan mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, budaya seni dan olahraga bahari dan jejaring inovasi maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Capaian target kinerja Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim berdasarkan *internal proses, customer perspektif dan Learning and Growth* tahun 2017.

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2017 juga membandingkan target kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, membandingkan capaian tahun ini dengan target capaian dalam Rencana Strategis Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim 2016-2019. Setelah itu, dilakukan analisis atas capaian terkait hal-hal yang menunjang/menurunkan capaian kinerja, analisis sumberdaya dan program penunjang tercapainya kinerja.

Tabel 4. Capaian Kinerja Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi	Capaian
<b>Customer Perspektif</b>					
1	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang dapat diimplementasikan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang menjadi dasar Penerbitan Kebijakan para Pemangku Kepentingan (yang ditindaklanjuti)	50%	4 Kebijakan	100%
2	Terlaksananya Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang efektif	Persentase Rekomendasi hasil Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya maritim yang dilaksanakan para Pemangku Kebijakan	50%	2 Kebijakan	100%
<b>Internal Process Perspective</b>					
3	Tersedianya Formulasi hasil Koordinasi/Sinkronisasi Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Jumlah Rumusan/Formulasi Kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya maritim yang dihasilkan	8 Kebijakan	8 Kebijakan	100%
4	Tersedianya Rekomendasi hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan	4 Kebijakan	4 Kebijakan	100%

	Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Kebijakan bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim			
5	Terselenggaranya Aksi/Kegiatan Pengembangan Wawasan Kemaritiman (Revolusi Mental di bidang Kemaritiman)	Peserta yang Berpartisipasi dalam Program Peningkatan Wawasan Kemaritiman	4.000 Orang	3.569	89,25
		Jumlah Event Nasional Wisata yang dikoordinasikan	5 event	5 event	100%
		Jumlah Peserta yang terlibat dalam Gerakan Aksi Bersih	5.000 Orang	15.852	317,04%
<b>Learning and Growth Perspektif</b>					
6	Terwujudnya <i>good governance</i>	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (akip)	≥ 60	23,59	39,31%
7	Terkelolanya anggaran secara optimal	Persentase penyerapan anggaran	≥ 90%	95,6	106
<b>TOTAL KINERJA</b>					<b>135,8%</b>

Sesuai dengan Renstra Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2016-2019, tahun 2017, Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan adalah terwujudnya koordinasi kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim dan tindak lanjut hasilnya sebanyak 12 kebijakan. Pada pelaksanaannya, target kebijakan ini tercapai 100% yang terdiri dari 8 (delapan) formulasi hasil koordinasi/sinkronisasi kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim dan 4 rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan. Ke delapan target IKU ini disumbangkan masing-masing ke empat Asisten Kedeputian sebanyak 2 kebijakan. Dari delapan kebijakan ini direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait sebanyak empat kebijakan (Table 4).

Pada Capaian kinerja Revolusi Mental di bidang Kemaritiman (Pengembangan Wawasan Kemaritiman) kedeputian dengan sasaran program terselenggaranya Aksi/Kegiatan terdapat capaian kurang dari target yakni hanya mencapai 89, 25 persen pada Indikator Kinerja Peserta yang Berpartisipasi dalam Program Peningkatan Wawasan Kemaritiman. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya kebijakan pemotongan anggaran APBN-P Kemenerian/Lembaga pada bulan Agustus 2017 menyebabkan anggaran untuk mendukung kegiatan aksi pengenalan wawasan kemaritiman menjadi berkurang. Sedangkan pada indikator kinerja Revolusi Mental dengan jumlah peserta yang terlibat dalam Gerakan Aksi Bersih (GIB) dari target yang diharapkan sebesar 5.000 peserta, terealisasi mencapai 15.852

peserta atau mencapai 317%. Hal ini dikarenakan meningkatnya partisipasi K/L pemda, dan komunitas dalam penyelenggaraan aksi bersih di seluruh Indonesia. Realisasi kinerja anggaran dari 90 persen yang ditargetkan teralisasi sampai 95,6 persen dengan capaian kinerja 106.

Secara rinci, penjabaran capaian kinerja Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2017 dapat digambarkan di bawah ini.

#### Sasaran Strategi :

- Tersedianya formulasi hasil koordinasi/sinkronisasi kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim

#### 3.1.1. Jumlah rumusan kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang Dihasilkan

Pada Tahun 2017 capaian kinerja (internal proses) yang diperjanjikan pada Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim untuk Indikator Kinerja Utama jumlah rumusan/formulasi kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang dihasilkan sebanyak 8 bahan kebijakan (sub IKU). Walaupun terdapat kebijakan nasional pemotongan anggaran, jumlah rumusan kebijakan yang dihasilkan tetap 8 (delapan) rekomendasi. Selengkapnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Rekomendasi Kebijakan SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang Dihasilkan Lingkup Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim.

No	Sasaran Stratgis	IKU	Urian Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Internal Process</b>						
1	Sasaran Strategi : Tersedianya formulasi hasil koordinasi/sinkronisasi kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Jumlah rumusan/formulasi kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya maritim yang dihasilkan	1. Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan 2. Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Sertifikasi Profesi Kemaritiman 3. <i>Road Map</i> Pengembangan Energi Arus Laut 4. Rekomendasi Pengelolaan Sampah	8 Dokumen		

			Plastik di Laut ( <i>Marine Debris</i> )		8 Dokumen	100%
			5. Rekomendasi Kebijakan Pengenalan Olahraga Bahari Kepada Generasi Muda untuk Mendukung Pariwisata Nasional			
			6. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Karakter Bangsa Bahari			
			7. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional			
			8. Rekomendasi Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Kapal Pelayaran Rakyat			

Dari 8 kebijakan yang diperjanjikan, terlaksana 8 kebijakan atau sebesar 100 persen. Dibandingkan dengan jumlah kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kebijakan yang dihasilkan pada tahun 2017 dari 18 kebijakan menjadi 8 dokumen kebijakan. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 semua bahan kebijakan yang dihasilkan di level eselon dua (asdep) menjadi kebijakan di tingkat deputy. Sedangkan pada tahun 2017, dibatasi hanya 2 kebijakan yang menjadi isu utama tiap eselon dua dan diteruskan menjadi formulasi kebijakan tingkat deputy.

### 1. Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan pendidikan sebagaimana RKP 2017 salah satu program prioritas adalah Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas. Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan adalah kurikulum yang andal dengan sasaran tersedianya 232 dokumen buku yang dinilai dan 130 model kurikulum yang dikembangkan. Olehnya itu, sebagai bentuk dukungan, Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang membawahi isu pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia mendorong tersedianya model kurikulum kemaritiman di tingkat pendidikan dasar dan

menengah. Pada tanggal 4 Mei 2017 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengarusutamaan bidang kemaritiman dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai tindak lanjutnya, dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama pada level Eselon I antara Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 Agustus 2017. Tujuan dari perjanjian kerjasama adalah dalam rangka menyinergikan dan mengoptimalkan kegiatan pengembangan kurikulum kemaritiman secara berstruktur dan berjenjang dalam pendidikan formal dan non formal. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Koordinasi dan sinergi dalam pengembangan kurikulum muatan kemaritiman
- b. Pengembangan kapasitas, komitmen dan peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penerapan kurikulum kemaritiman, dan
- c. Penyelenggaraan berbagai kegiatan sosialisasi dan pemberian penghargaan kepada lembaga pendidikan dan/atau individu yang berprestasi di bidang kemaritiman

Adanya PKS dan MOU dan komitmen bersama yang besar dalam rangka meningkatkan wawasan kemaritiman pada generasi muda sebagaimana amanat nawa cita mendorong pelaksanaan penerapan kurikulum ini lebih cepat terealisasi.

## 2. Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Sertifikasi Profesi Kemaritiman

Masih terkait dengan pembangunan pendidikan utamanya meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing dari lulusan sekolah kemaritiman, tahun 2017, Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim menyelenggarakan Penyusunan Kebijakan Sertifikasi Profesi Kemaritiman yang bertujuan menyiapkan rencana aksi antisipasi diberlakukannya ratifikasi STCW 1995 melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kepelautan kapal penangkap ikan berbasis konvensi Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F).



Mengantisipasi ratifikasi Konvensi STCW-F 1995 oleh Pemerintah Indonesia dalam waktu dekat, diperlukan upaya penyiapan kelembagaan pendidikan dan pelatihan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan atau kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Konvensi. Penyiapan lembaga pendidikan dan pelatihan antara lain melalui menerapkan kurikulum, tenaga pengajar, sarana prasarana dan proses belajar mengajar serta sertifikasi yang mengikuti prinsip-prinsip pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana diatur dalam konvensi STCW-F 1995. Lembaga pendidikan dan/atau pelatihan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berstandar internasional STCW-F 1995,.

Memperhatikan kondisi dan kebutuhan kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan pelatihan, serta sertifikasi kepelautan dan kapal penangkap ikan untuk memenuhi peraturan-peraturan sesuai konvensi STCW-F 1995, direkomendasikan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan SDM perikanan:

- 1) Pengembangan kurikulum pendidikan dan/atau kepelautan kapal penangkap ikan.
- 2) Mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- 4) Mempersiapkan norma, standar, pedoman, dan kebijakan teknis terkait dengan pendidikan dan pelatihan kepelautan kapal penangkap ikan.
- 5) Mempersiapkan dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepelautan kapal penangkap ikan

Dengan adanya standarisasi lembaga pendidikan dan atau pelatihan berstandar internasional STCW-F 1995, kualitas lulusannya meningkat sehingga memiliki manfaat, seperti:

1. Meningkatnya keselamatan navigasi dan penangkapan ikan;
2. Adanya kepastian hukum bagi awak kapal penangkap ikan Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan negara lain yang telah meratifikasi STCW-F 1995, sehingga akan lebih meningkatkan devisa negara;

3. Dengan meningkatnya standar kualitas awak kapal penangkap ikan Indonesia, dunia internasional akan memosisikan awak kapal penangkap ikan Indonesia sejajar dengan awak kapal penangkap ikan negara lain yang lebih maju;
4. Meningkatkan penyerapan dan daya saing awak kapal penangkap ikan Indonesia di pasar kerja global;
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
6. Mencegah pencemaran laut akibat kegiatan penangkapan ikan;
7. Meningkatkan kerja sama internasional khususnya di bidang kelautan dan perikanan;
8. Meningkatkan investasi usaha di bidang kelautan dan perikanan di dalam negeri;
9. Meningkatkan kualitas dan nilai jual hasil tangkapan melalui penangkapan dan penanganan diatas kapal oleh tenaga kerja yang berkompeten.
10. Meningkatkan kemampuan awak kapal penangkap ikan dalam memanfaatkan teknologi maju;
11. Mencegah terjadinya perbudakan pelaut perikanan di atas kapal baik dalam negeri maupun luar negeri.
12. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara maritim di dunia internasional.
13. Menyiapkan SDM Pelaut kapal penangkap ikan yang kompeten untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi profesi ini adalah belum adanya sarana dan prasarana memadai di sekolah kejuruan, tenaga kependidikan yang masih belum memadai. Diperlukan terobosan dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan komitmen dari pemerintah daerah dan pusat.

### 3. *Road Map Pengembangan Energi Arus Laut*

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan energy nasional (Prioritas Nasional Sektor Unggulan) serta mendorong percepatan pemanfaatan sumberdaya energi baru dan terbarukan khususnya di bidang kemaritiman, dimana Indonesia sebagai negara

kepulauan khususnya potensi perairannya juga dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya energi alternatif selain fosil. Energi laut tersebut dapat tercipta dari elevasi pasang surut (*tidal power*), perbedaan temperature (*Ocean Thermal Energy Conversion/ OTEC*), arus (*current power*), gelombang (*wave power*), dan angin di tepi pantai Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai institusi terkait, telah dilakukan perhitungan potensi energi laut Indonesia mulai dari sumberdaya teoritis (*theoretical resources*), sumberdaya teknis (*technical resources*) sampai dengan sumberdaya praktis (*practical resources*) dengan total sekitar 49 GW dan kapasitas terpasang 0.01 GW.

Pemanfaatan energi laut merupakan agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan kedaulatan energi dan kemandirian ekonomi dengan sasaran peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sampai tahun 2019 sebesar 16%. Kegiatan diawali dengan pembangunan pilot project pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW. Kemenko Kemaritiman perlu memperkuat pelaksanaan koordinasi kebijakan dan tata kelola pengembangan energi baru dan terbarukan maritim serta mensinergikan program nasional pemanfaatan energi terbarukan laut (*Ocean Renewable Energy/ORE*), khususnya untuk memastikan terbangunnya pilot project energy arus laut antara lain mempertajam rekomendasi sebagai berikut:

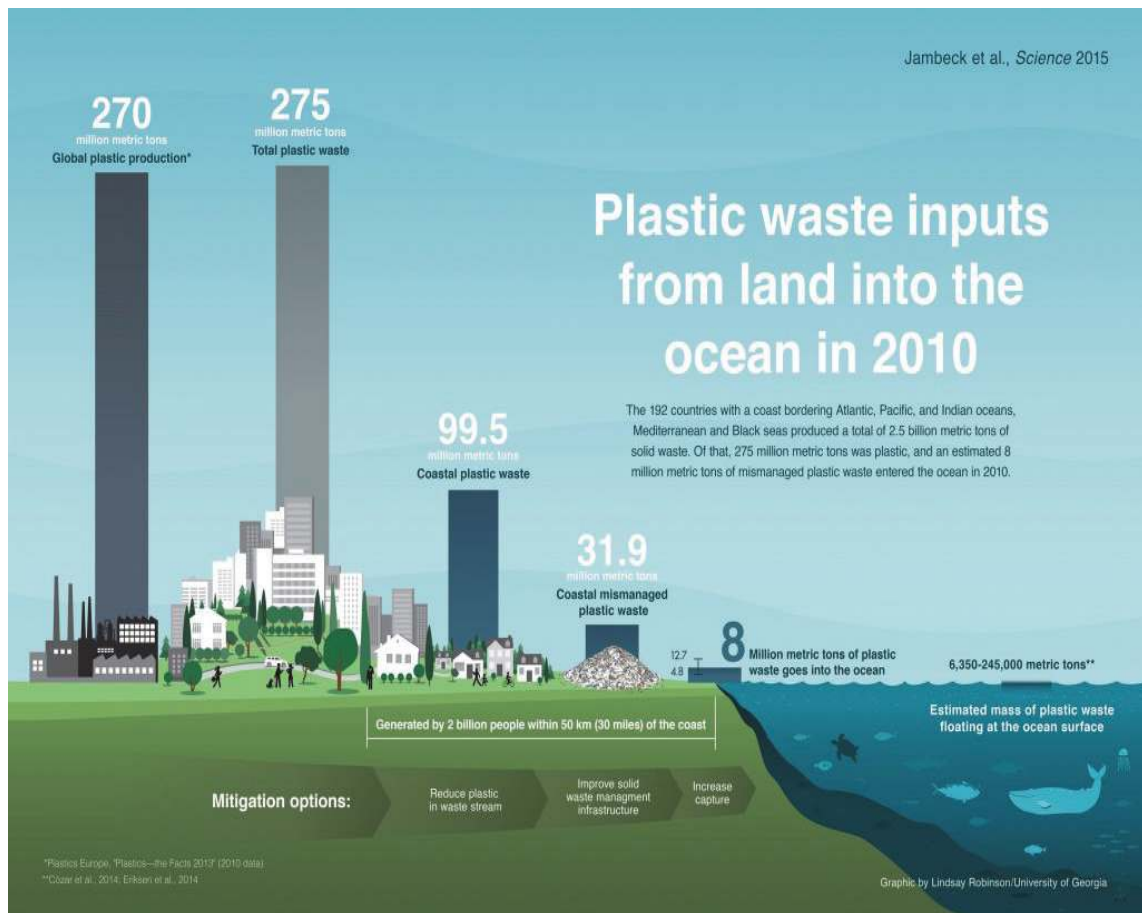
- Roadmap Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif dari Laut

Kementerian ESDM secara teknis yang memimpin penyiapan roadmap dimaksud dengan koridor berikut: Robert Gordon University/RGU (Inggris) dan ITS bekerjasama menyusun Rekomendasi *Roadmap* Energi Laut di Indonesia dengan *timeline* 10 tahun (2016-2025). Pihak lainnya yang ikut terlibat dalam penyusunan tersebut adalah Indonesian Counterpart for Energy and Environmental Services (ICEES), ASELI/INOCEAN dan Aquatera Ltd. Pada umumnya, pengembangan energi laut difokuskan pada pengembangan skala besar (on grid) seperti pada negara lain atau skala kecil di lokasi terpencil. *Roadmap* ini menawarkan penggunaan *Strategi Twin Track* yaitu pengembangan energi laut skala kecil dan besar dengan mencocokkan teknologi yang tersedia dengan kebutuhan energi masyarakat/user. Dari dokumen yang dihasilkan direkomendasikan untuk mengidentifikasi tiga lokasi dengan potensi energy laut yang besar sekaligus mewakili Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur yaitu Aceh, Lombok (NTB), NTT dan Papua Barat.

- Usulan Penetapan Kontribusi dari pemanfaatan teknologi *Ocean Renewable Energy* terhadap target capaian dari Energi Terbarukan sebesar 17,5% dari energi nasional pada tahun 2025
- Penerapan Teknologi yang tepat guna dengan memanfaatkan manajemen energi nasional, potensi dan sumber daya, kapasitas sumberdaya manusia serta tingkat kandungan dalam Negeri (TKDN).
- Kebijakan yang diperlukan untuk mendorong penerapan teknologi tersebut secara luas (kebijakan Insentif untuk *Ocean Renewable energy*)

#### 4. Rekomendasi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (*Marine Debris*)

Sampah plastik di laut merupakan salah satu polusi dan limbah yang menjadi tantangan global saat ini. Masalah ini sudah menjadi perhatian dunia pada tahun 2012 yaitu pada saat pertemuan PBB di Brasil (Konfrensi Rio +20) dengan hasil di antaranya bahwa perlu adanya aksi dalam mereduksi polusi sampah yang akan merusak ekosistem pesisir dan laut. Penelitian Jenna Jambeck dari Universitas Georgia, terhitung 12.7 juta ton sampah plastik masuk dari darat ke laut yang berasal dari 192 negara pesisir di dunia. Komitmen global lain sebagai landasan penanggulangan sampah plastik adalah : *Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities 1995, Plastic Debris in the World's Ocean, Marine Litter A Global Chalaneg 2009, 5th International Marine Debris Conference 2011 dan Marine plastic debris and microplastic – Global lessons and research to inspire action and gide policy change 2016.*



**Gbr.** Info grafis yang menunjukkan Jumlah estimasi sampah plastik yang masuk ke laut akibat dari berbagai aktivitas manusia (Jambeck et al., 2015)

Rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Sampah Plastik di Lautan disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi K/L, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyusunan program dan kegiatan terkait pengelolaan sampah plastik secara minimal dan dalam rangka mengurangi jumlah sampah plastik di Lautan Indonesia melalui tindakan yang lebih terstruktur dengan melibatkan seluruh unsur dan stakeholders ada. Secara umum RAN Pengurangan Sampah Plastik di Lautan Indonesia menekankan pada pentingnya panduan koordinasi, saran teknologi dan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kajian ilmiah, analisa spesifik, dan berlandaskan hukum.

Rancangan Perpres RAN Pengelolaan Sampah Plastik di Lautan meliputi kebijakan strategis dan langkah konkrit yang akan dilakukan untuk penanggulangan sampah plastik yang bermuara ke laut dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan

bersih. RAN ini mengacu pada kebijakan kelautan, nawacita, dan komitmen pembangunan nasional yang akan di laksanakan pada 2017-2025.

Penyusunan Dokumen Draf Perpres RAN Pengelolaan Sampah Plastik di Lautan Indonesia ini diawali dengan pertemuan-pertemuan, antara lain FGD, seminar dan workshop yang dilanjutkan dengan penyusunan tim POKJA yang secara khusus bertugas membahas penyusunan dokumen Draf RAN Pengelolaan Sampah Plastik di Lautan Indonesia. Pada akhirnya dokumen ini diharapkan berisikan isu, tantangan, strategi, dan rencana aksi yang sudah mewakili stakeholders yang berasal dari daerah, instansi pemerintah pusat dan terkait, universitas, masyarakat, praktisi, dan LSM. RAN pengelolaan Sampah Plastik di Lautan Indonesia ini dapat dijabarkan pada setiap program dan kegiatan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing sehingga pengelolaan sampah plastik di Laut akan lebih efisien dan efektif karena dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

## 5. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Karakter Bangsa Bahari

Pendiri bangsa Indonesia sangat memahami karakter bangsa Indonesia yang telah berjaya sejak jaman kerajaan di nusantara adalah dengan menguasai kemaritiman. Oleh karena itu, salah satu pilar dalam Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pengembangan karakter dan wawasan budaya bahari.

Olehnya itu, untuk mencapai terwujudnya karakter kemaritiman dilakukan melalui kebijakan dan strategi seperti di bawah ini:

## Kebijakan

- Menumbuhkan dan memperkuat wawasan, semangat jiwa bahari dan mencintai laut
- Penguatan wawasan dan pengetahuan kemaritiman melalui pelestarian nilai-nilai sejarah
- Identifikasi dan Penguatan Budaya Maritim Nusantara dan Penguatan Kearifan Lokal

## Strategi

- Mendorong partisipasi luas masyarakat dalam upaya penguatan wawasan kemaritiman
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi, penggalian, pengkajian, pelestarian serta kerjasama dalam upaya penguatan wawasan
- Mendorong dan Memfasilitasi Proses Identifikasi dan Penguatan Budaya Maritim Nusantara dan Penguatan Kearifan Lokal

Sebagai bagian dalam menerapkan kebijakan dan strategi peningkatan karakter bangsa bahari, tahun 2017, Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim melaksanakan kegiatan diantaranya adalah:

1. *Menumbuhkan dan memperkuat wawasan, semangat jiwa bahari dan mencintai laut*
  - Teater Sandiwara Radio Dapunta bekerjasama dengan RRI.  
Sesuai dengan Perjanjian kerjasama nomor NK.01/D.IV/Maritim/II/2017 dan Nomor 359/DU/02/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim dengan Direktur LPP RI Jakarta untuk menyiarkan sandiwara radio dengan produksi 45 episode. Kegiatan Sandiwara Radio Dapunta dimaksudkan untuk menguatnya budaya dan karakter bahari, meningkatnya wawasan sejarah maritime serta pengetahuan masyarakat dan jiwa mencintai dan melestarikan laut melalui program penyiaran radio.
  - Festival Film Pendek Kemaritiman bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenpar dengan kategori Pelajar dan Umum

Hasil yang diharapkan adalah meluasnya partisipasi masyarakat dalam festival film pendek kemaritiman dan meningkatnya wawasan kemaritiman,

menguatnya budaya dan karakter bahari, meningkatnya wawasan sejarah maritim serta pengetahuan masyarakat dan jiwa mencintai dan melestarikan laut

2. *Penguatan wawasan dan pengetahuan kemaritiman melalui pelestarian nilai-nilai sejarah*

Kemenko Kemaritiman mendorong pelestarian nilai sejarah keamritiman dengan mengambil sosok perempuan pejuang dari Aceh – Laksamana Malahayati.

Dalam sejumlah riwayat sejarah, Laksamana Malayahati digambarkan sebagai panglima perang Kesultanan Aceh, yang mampu menaklukkan armada angkatan laut Belanda dan bangsa Portugis (Portugal) pada abad ke-16 Masehi.

FGD Laksamana Malahayati bekerjasama dengan komunitas perfilman, pakar budaya, seni dan sejarah. Penggalan Budaya Maritim dan Pelestarian Sejarah Dalam Jejak Perjuangan Laksamana Malahayati sebagai Sumber Inspirasi Generasi Bangsa.

Pada akhirnya, Pemerintah RI menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Laksamana Malahayati dari Kesultanan Aceh tepat hari, Kamis (9/11/2017). Pengangkatannya sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

3. *Identifikasi dan Penguatan Budaya Maritim Nusantara dan Penguatan Kearifan Lokal*

International Science Conference of Sea Gypsy Bajo Dynamic: Culture and Identity, kerjasama dengan Universitas Hasanuddin, Lembaga Masyarakat Bajo dan Pemda. Kegiatan ini bertujuan untuk mengintensifkan studi terkait budaya bahari yang tumbuh di masyarakat nusantara.

Rekomendasi yang dihasilkan adalah:

1. Mengoptimalkan media sinema film dalam mendorong partisipasi luas masyarakat dalam proses Menumbuhkan dan memperkuat wawasan, semangat jiwa bahari dan mencintai laut



2. Mengoptimalkan media sinema radio dalam mendorong partisipasi luas masyarakat dalam proses Menumbuhkan dan memperkuat wawasan, semangat jiwa bahari dan mencintai laut
3. Menumbuhkan dan memperkuat wawasan, semangat jiwa bahari dan mencintai laut bagi generasi muda melalui olahraga bahari
4. Mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya identifikasi dan penguatan budaya maritim nusantara

## 6. Rekomendasi Kebijakan Pengenalan Olahraga Bahari Kepada Generasi Muda untuk Mendukung Pariwisata Nasional

Pengembangan olahraga di Indonesia harus dilaksanakan secara berkesinambungan, terprogram, dan menuntut kerja keras agar tercapainya prestasi dan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang baik. Pembinaan olahraga dimulai sejak usia dini baik pada lembaga non formal maupun lembaga formal, Karena telah dirasakan bahwa olahraga dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap seluruh elemen kehidupan manusia.

Indonesia kaya sumber daya alam dan budaya yang berpotensi besar melahirkan event olahraga sekaligus sebagai faktor atraksi dalam produk pariwisata layak jual. Even olahraga pariwisata dengan konsep seperti ini dalam Tour de Singkarak, Musi Tribootton, serta Sail Indonesia yang mengasosiasikan persepsi masyarakat dunia akan luas dan indahnnya wisata bahari di Indonesia sebelumnya. Pariwisata dan olahraga merupakan dua disiplin ilmu yang dapat di padukan sehingga memiliki kekuatan dan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu pariwisata dan olahraga (*sport tourism*) saat ini mendapatkan perhatian besar baik dari pihak pemerintah, swasta, industri olahraga, industri pariwisata, akademis maupun masyarakat luas.

Kemenko Bidang Kemaritiman mendorong K/L untuk mengembangkan olahraga bahari kepada generasi muda dalam mendukung mendukung Pariwisata Bahari Nasional ditujukan untuk:

- a. Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan pengembangan olahraga khususnya olahraga rekreasi bagi generasi muda;
- b. Kementerian Pariwisata terkait dengan pengembangan wisata olahraga dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara;
- c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan dukungan fasilitasi sarana dan prasarana olahraga bahari;

- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan dukungan data dan informasi potensi olahraga bahari di Indonesia;
- e. Induk organisasi secara khusus olahraga bahari terkait dengan pola rekrutmen dan pengembangan atlet;
- f. Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan olahraga bahari untuk generasi muda dan penyelenggaraan event-event olahraga yang dapat mendatangkan wisatawan mancanegara dan nusantara.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rekomendasi ini diantaranya kegiatan untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) misalnya Workshop Olahraga Bahari Bagi Generasi Muda pada tanggal 9 Juni 2017 di Tanjung Kelayang, penyelenggaraan Workshop Olahraga Bahari Bagi Generasi Muda dalam rangka mendukung Belitung sebagai destinasi olahraga memancing.

Rekomendasi dan arah kebijakan dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga;
2. Penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. Peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
4. Pengembangan potensi wisata dan olahraga bahari dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
5. Perlu menumbuhkembangkan olahraga rekreasi sehingga memancing minat masyarakat pesisir;
6. Perlu membangun sarana prasarana olahraga bahari yang mudah diakses masyarakat;
7. Perlu penguatan kelembagaan seperti KONI sehingga dapat menerima manfaat dari kegiatan pengembangan olahraga bahari secara nasional;
8. Perlu menyiapkan pelatih sehingga mendukung kelangsungan olahraga tersebut;
9. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan event-event olahraga secara khusus olahraga bahari (Internasional, Regional, Nasional dan Lokal).

## 7. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional

Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim menargetkan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional. Sampai dengan bulan Juni 2017 telah dihasilkan Draft Keputusan Kemenko tentang Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI). Proses penyusunan keputusan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi lintas sector seperti

Gbr. Rapat Koordinasi Penyusunan Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)



Kementerian Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PUPR dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu dilaksanakan kunjungan lapangan/survey ke beberapa lokasi yang akan diusulkan menjadi geopark nasional guna melihat kesiapan masing-masing daerah dalam mengoptimalkan potensi geopark.

Tugas dari Komite Nasional Geopark Indonesia adalah mengkoordinasikan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan geopark, peningkatan status geopark local menjadi UGG (*Unesco Global Geopark*) dan geopark nasional serta monitoring dan evaluasi.

## 8. Rekomendasi Kebijakan Diversifikasi Usaha Pelayaran Rakyat dalam Mendukung Wisata Bahari

Pada Prioritas Nasional salah satu implementasi tol laut adalah konektivitas pulau-pulau kecil dan subfeeder tol laut. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah revitalisasi pelayaran rakyat. Revitalisasi ini terkait dengan pengembangan design atau prototype perla serta peningkatan kapasitas dan sertifikasi SDM Pelra.

Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim menyusun bahan rumusan kebijakan diversifikasi usaha pelayaran rakyat dalam mendukung wisata bahari dengan maksud untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan draft regulasi tentang diversifikasi usaha dalam mendukung wisata bahari, sedangkan tujuannya

adalah untuk memberikan payung hukum bagi pelaku usaha pelayaran rakyat melakukan diversifikasi usaha, dari yang sebelumnya usaha pelayaran melakukan angkutan barang bisa melakukan diversifikasi menjadi moda transportasi guna mendukung wisata bahari.

Ruang lingkup kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Menyusun rumusan kebijakan untuk menghasilkan produk regulasi berupa payung hukum untuk memudahkan pelaksanaan diversifikasi pelayaran rakyat dalam mendukung wisata bahari.
2. Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata (DP) sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
3. Mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. Ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPN sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan Keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPN serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
4. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPN.

Prinsip penanganan isu yang dilakukan merujuk kepada : 1) Pembangunan wisata bahari belum dikembangkan secara holistic mencakup pemanfaatan potensi sumberdaya alam bahari dan keterkaitannya dengan potensi sumberdaya akar budaya bahari. 2) Wisata bahari dapat menjadi alat strategis (*strategic weapon*) dalam melestarikan warisan budaya bahari termasuk transportasi kapal layar tradisional sebagai salah satu identitas peradaban bangsa bahari untuk Indonesia. 3) Wisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya kembali jiwa dan akar budaya bahari yang dimungkinkan memberikan efek ganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. 4) Wisata bahari dengan melestarikan (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan) keberadaan akar budaya bahari dan kehidupan keseharian masyarakatnya mampu memberikan pengaruh besar terhadap penguatan karakter bangsa, terobosan ekonomi (*economic breakthrough*), serta konservasi lingkungan bahari.



Gambar. Rapat Penyusunan Rekomendasi Diversifikasi Pelra dalam Mendukung Pariwisata Bahari.

### Sasaran Strategi :

- **Tersedianya rekomendasi kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang dapat diimplementasikan**

#### 3.1.2. Persentase rekomendasi kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti

IKU persentase rekomendasi kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti (*costumer persfektive*) sebanyak 4 rekomendasi. Berikut indikator kinerja yang diperjanjikan tersebut:

Tabel 6. Persentase rekomendasi kebijakan D4 yang menjadi dasar penerbitan kebijakan pemangku kepentingan (yang ditindaklanjuti)

Sasaran Strategis	Uraian IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya rekomendasi	1. Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan;			

kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang dapat diimplementasikan	2. Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (Marine Debris);	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	3. Penguatan Karakter Bangsa Bahari;			
	4. Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional;			

Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim menargetkan tersedianya Rekomendasi Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang dapat diimplementasikan tercapai 4 dokumen rekomendasi atau tercapai 100 persen. Penjelasan tiap rekomendasi dapat dilihat pada bagian di bawah ini.

#### 1. Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan.

Dalam rangka implementasi perjanjian kerjasama, implementasi kurikulum kemaritiman akan dilaksanakan melalui empat model yang disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah dan penyelenggara / satuan pendidikan. Ke 4 model itu adalah:

- a. Kontekstualisasi/warna mata pelajaran
- b. Pengayaan/integrasi dalam mata pelajaran
- c. Ekstra kurikuler dan budaya sekolah
- d. Muatan pelajaran tersendiri/ muatan local

Dari keempat model yang disarankan opsi a) dan b) adalah opsi yang paling memungkinkan dengan alasan tidak memerlukan sertifikasi tersendiri bagi guru sehingga tidak menimbulkan konsekuensi penambahan anggaran kinerja guru. Penerapan muatan kurikulum kemaritiman ini akan dilakukan pada 12 provinsi mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK non kemaritiman. Provinsi itu adalah:

- |             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1) Aceh     | 7) Kalimantan Timur     |
| 2) Bengkulu | 8) Sulawesi Selatan     |
| 3) Banten   | 9) Nusa Tenggara Timur  |
| 4) DKI      | 10) Nusa Tenggara Barat |

5) Jawa Barat

11) Maluku

6) Jawa Timur

12) Papua Barat

## 2. Pengelolaan Sampah Plastik di Laut

Kementerian Koordinator Kemaritiman terus mendorong kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah plastik di laut. Rencana Aksi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Plastik di Laut 2017-2025, merupakan arahan strategis dalam rangka percepatan penanggulangan sampah plastik di laut untuk periode 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2025. Pada pasal 2 bahwa RAN ini beri pedoman sebagai berikut:

- a. Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan sampah plastik di laut sesuai bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan;
- b. Pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan percepatan penanggulangan sampah plastik di laut; dan
- c. Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penanggulangan sampah plastik di laut.

Pada tahun 2018, langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mendorong pengelolaan sampah plastik di laut adalah:

- Koordinasi Gerakan Indonesia Bersih dan Aksi GBBS
- Workshop on Marine Debris Pollution, di Makassar 26-27 Mei 2016 (Coop w/WB and DANIDA)
- *Focus Group Discussion* mengenai pemantauan dan pengendalian sampah laut, 25 -26 Oktober 2016
- National Marine Plastic Debris Summit, di Jakarta 1 – 3 November 2016 (Coop WB and DANIDA)

### 3. Penguatan Karakter Bangsa Bahari

Penguatan karakter bangsa bahari dapat dilakukan melalui penguatan dan pengembangan budaya bahari. Dengan penguatan budaya bahari, masyarakat Indonesia akan belajar keuletan, kerja keras, entrepreneurship gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Budaya bahari yang kuat akan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolah raga, dan berekreasi serta mendidik masyarakat.

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia program nelayan dan masyarakat pesisir mendorong bangkitnya pemahaman wawasan dan budaya bahari. Kebijakan yang dilakukan adalah mendorong lembaga dan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana aksi seperti:

1. Penyisipan materi muatan lokal bahari (pengenalan lingkungan laut, pengenalan aktivitas budaya bahari) pada kurikulum, sistem pembelajaran, dan buku untuk semua tingkat pendidikan mulai dari usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal, dan informal (KKP)
2. Masyarakat kelautan dan perikanan yang terlatih (Kemenaker dan Pemda)
3. Terciptanya kreativitas dan sinergi penyelenggaraan budaya/olahraga bahari yang mendorong penguatan karakter bahari (Kemenko Kemaritiman)
4. Meningkatnya kualitas destinasi wisata budaya (Kementerian Pariwisata)
5. Meningkatnya pemberdayaan dan pembinaan wilayah pertahanan negara matra laut (Mabes TNI)

Terkait dengan peningkatan dan pemahaman budaya bahari, Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim terus mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai stakeholder serta mendorong peningkatan seni, budaya dan olahraga bahari sebagai destinasi maupun objek wisata. Berdasarkan data kalender event yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata tahun 2017 dan 2018 terjadi kenaikan jumlah event yang terkait dengan wisata ataupun seni dan budaya bahari. Pada tahun 2017 terdapat 31 event meningkat menjadi 54 event pada tahun 2018. Event - event ini terdiri dari festival budaya, lomba olahraga danau, laut, sungai.

Selain dari 5 event yang diselenggarakan oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, pada 2017, dilakukan koordinasi kementerian teknis dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan berbagai event seperti *Tour de Moluccas*, *Widi*



*Internasional Fishing Tournament*, Kegiatan Budaya Banda Neira dan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kementerian pariwisata dan pemerintah daerah.

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan wisata bahari yang terkait dengan karakter perilaku membuang sampah dan menjaga kebersihan dan keramahmatan yang masih harus ditingkatkan.

#### 4. Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional

Geopark adalah kawasan geografis menyatu dengan batas-batas yang jelas dan memiliki warisan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya bernilai tinggi, yang dikelola secara terpadu untuk keperluan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Kemenko Bidang Kemaritiman telah menginisiasi Komite Nasional Geopark Nasional yang bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan geopark, peningkatan status geopark local menjadi UGG (*unesco global geopark*) dan geopark nasional serta monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka lebih mendorong pengelolaan Jejaring Geopark secara nasional KNKI menyusun draft peraturan presiden tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Tahun 2017. Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam pengembangan dan penetapan *Geopark*. Ruang lingkup perpres *Geopark* ini adalah:

- a. Pengembangan *Geopark*;
- b. Penetapan *Geopark*;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Kelembagaan; dan
- e. Pendanaan.

#### Sasaran Strategi :

- Terlaksananya Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim yang efektif

### 3.1.3. Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya maritim yang dilaksanakan para pemangku kebijakan.

Indikator Kinerja Utama pada yang diperjanjikan adalah:

1. Hasil Pelaksanaan Kebijakan Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan
2. Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional

Capaian rekomendasi hasil Pengendalian Penerapan Muatan Kemaritiman dalam kurikulum pendidikan dan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional ditargetkan selesai pada triwulan IV. Untuk mencapai target output kinerja ini melalui rapat koordinasi/workshop/FGD dan persiapan teknis, kunjungan lapangan, dan lain-lain.

#### 1. Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan



Tindak lanjut dari MOU dan PKS antara Kemenko Kemaritiman dengan Kemendikbud adalah dihasilkannya Panduan Implementasi Kurikulum Kemaritiman 2017 pada bulan Oktober oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Pembukuan Kemendikbud. Pedum ini materinya disesuaikan dengan pengembangan diversifikasi kurikulum dan karakteristik daerah serta kebutuhan siswa.

Panduan implementasi kurikulum kemaritiman merupakan hal yang perlu diwujudkan untuk kemajuan daerah yang menerapkannya. Diversifikasi yang dikembangkan di daerah juga bertujuan untuk menjawab tantangan dan dinamika perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat local sebagai koridor penerapan otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan bukan hanya masalah kewenangan dan anggaran namun terkait juga dengan kebijakan diversifikasi kurikulum daerah.

Konten dalam kurikulum kemaritiman juga menggambarkan ragam potensi yang terdapat di daerah seperti kearifan local, budaya, sumberdaya alam, norma

dan nilai-nilai yang memerlukan kesepakatan tingkat daerah. Olehnya itu, panduan kurikulum menjadi penting sebagai instrument dan stadar pengukuran capaian yang didapatkan oleh siswa.

## 2. Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional

Bertempat di Belitung dilaksanakan Penyerahan 5 Status Geopark Lokal Menjadi Geopark Nasional pada tanggal 24 November 2017. Penyerahan sertifikat Geopark Nasional dilakukan oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim kepada perwakilan dari Geopark Tambora Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB), Geopark Raja Ampat Papua Barat, Geopark Marospangkep Sulawesi Selatan dan Geopark Bojonegoro.

Tiap daerah yang diusulkan pada tanggal 21 oktober melakukan pemaparan dihadapan Tim Penilai Tim penilai nasional terdiri dari 15 orang dengan keahlian masing-masing dan telah ditetapkan melalui SK Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim. Dari lima usulan tersebut, terdapat tiga usulan geopark yang langsung lolos, Belitong, Raja Ampat, dan Tambora. Sedangkan untuk Maros-Pangkep dan Bojonegoro, itu diberikan status geopark tapi dengan catatan harus diperbaiki dengan waktu tertentu. Kalau lewat dari waktu itu, maka status geopark nasional akan dicabut.

Tahapan yang dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman dalam pengusulan Geopark Lokal menjadi Geopark Nasional adalah :

1. Membentuk Tim penilai nasional terdiri dari 15 orang dengan keahlian masing-masing dan telah ditetapkan melalui SK Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim.
2. Memilih 5 (lima) daerah (Belitong, Maros-Pangkep, Tambora, Bojonegoro dan Raja Ampat) yang sudah mengajukan permohonan kepada Menko Kemaritiman untuk dinaikkan statusnya dari Geopark Lokal menjadi Geopark Nasional. Permohonan tersebut lalu ditindaklanjuti dan diproses.
3. Sesuai peraturan UNESCO Global Geopark mensyaratkan dalam pengajuan dossier tahun 2018 adalah geopark yang telah menjadi geopark nasional

**Sasaran Strategi :**

- **Tersedianya Rekomendasi hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim**

selama 1 (satu) tahun. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan menaikkan status geopark nasional selambat-lambat tanggal 30 November 2017.

Gabar.. Penyerahan Sertifikat 5 Geopark Lokal Menjadi Geopark Nasional oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim



#### 3.1.4. Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim.

Tahun 2017 Deputi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim menargetkan 4 IKU yang menjadi fungsi pengendalian seperti table di bawah ini:

Tabel 8. Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	URAIAN KINERJA	Target	Realisasi
1	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	1. Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan	1	100%
		2. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Event Sail Selat Sabang Sebagai Tindaklanjut Terbitnya SKEP Menko Maritim	1	100%
		3. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 dalam Pelaksanaan Indonesia Bersih	1	100%
		4. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM dan Inovasi Iptek Bidang Perikanan	1	100%

Indikator kinerja yang diperjanjikan dan telah dilaksanakan adalah:

1. **Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan**

Dalam rangka membumikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia diperlukan upaya penyiapan sumberdaya manusia melalui pengenalan terhadap potensi dan konsepsi kemaritiman Indonesia. Pengenalan kemaritiman harus dilakukan secara komprehensif dan berjenjang melalui saluran pendidikan formal. Dalam hal ini, pengembangan dan implementasi muatan kemaritiman dalam kurikulum pendidikan menjadi salah satu pilihan kebijakan yang dianggap paling tepat.

Peluang pengembangan muatan kemaritiman di dalam kurikulum pendidikan sangat memungkinkan bahkan menjadi salah satu kebutuhan dalam rangka diverifikasi kurikulum yang ada saat ini. Pendekatan implementasi muatan kemaritiman dalam kurikulum pendidikan (Kurikulum Kemaritiman) dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebijakan daerah, kebutuhan, serta kesiapan di setiap unit penyelenggara pendidikan (sekolah).

Terdapat 4 pilihan implementasi kurikulum kemaritiman di sekolah, yaitu melalui:

1. Kontekstualisasi/Warna Mata Pelajaran/*blended*
2. Pengayaan/Integrasi dalam Mata Pelajaran
3. Ekstra Kurikuler dan Budaya Sekolah
4. Mata Pelajaran Tersendiri (muatan lokal)

Untuk mendorong pengembangan dan implementasi muatan kemaritiman dalam kurikulum pendidikan, telah dilakukan penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 01/PKB/MENKO/MARITIM/V/2017 - 14/V/NK/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Pengarusutamaan Bidang Kemaritiman Dalam Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PSK) yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: PKS.120/D.IV/Maritim/VIII/2017 - 05/VII/PKS/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Kurikulum Muatan Kemaritiman.

Kedua naskah kerjasama tersebut merupakan landasan bersama bagi pengembangan dan penerapan Kurikulum Kemaritiman, disamping dokumen-dokumen pendukung yang dihasilkan bersama, yaitu: 1) Naskah Akademis Kurikulum Kemaritiman; 2) Kurikulum Kemaritiman; dan 3) Panduan Implementasi Kurikulum Kemaritiman.

Untuk mendorong inisiasi implementasi kurikulum kemaritiman di daerah, pada tanggal 29-31 Oktober 2017 telah dilaksanakan Lokakarya Nasional Implementasi Kurikulum Kemaritiman. Pada kesempatan tersebut disepakati, sesuai dengan penetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, provinsi, kabupaten dan sekolah-sekolah yang dijadikan percontohan implementasi kurikulum kemaritiman, yaitu di 12 provinsi, 12 kab/kota, untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK Non Kemaritiman.

Tabel 9 . Daftar Sekolah Percontohan Implementasi Kurikulum Kemaritiman di 12 Provinsi

No.	Provinsi / Kab./Kota	Jenjang Pendidikan			
		PAUD	SD	SMP	SMA/SMK
1	Aceh / Kota Sabang	Tk Pertiwi sabang	SDN 27 sabang	SMPN 5 sabang	SMKN 1 sabang
2	Bengkulu / Kota Bengkulu	TK Dhrma Wanita Bengkulu	SDN 19 Bengkulu	SMPN 19 Bengkulu	SMAN 5 Bengkulu
3	Banten / Kab. Pandeglang	Al-Hidayah Banten	SDN 4 Kab Pandeglang	SMPN 1 Labuan Pandeglang	SMAN 2 Banten
4	DKI Jakarta	TK Hang Tuah 11 Pdk Labu Dkl Jakarta	SD Hang Tuah 5 Cilincing Dkl Jakarta	SMP Hang Tuah 2 Cipulir Dkl Jakarta	SMA Hang Tuah DkIO Jakarta
5	Jawa Barat / Kota Cirebon	Tk Darul Hikam Cirebon	SDN Pesisir Cirebon	SMPN 13 Cirebon	SMAN 5 Cirebon
6	Jawa Timur / Kota Surabaya	TK Hang Tuah 7 surabaya	SD Hang Tuah 10 Surabaya	SMP Hang Tuah 5 Surabaya	SMA Hang Tuah Surabaya
7	Kalimantan Utara / Kota Tarakan	TK Kartika Tarakan	SDN 012 Tarakan	SMPN 06 Tarakan	SMPN 06 Tarakan
8	Sulawesi Selatan / Kab. Pangkep	TK Binaan Kabupaten Pangkep	SDN 7 Pangkep	SMPN 4 Pangkep	SMK Perikanan Pangkep

9	NTB / Kab. Lombok Tengah	TK Baroqatussolotiah Lombok	SDN 4 Lombok	SMPN 10 Lombok	SMAN 1 Lombok
10	NTT / Kab. Sikka	TK Panti Ranti Maumere NTT	SD Kolisia Sikka NTT	SMPN 3 Sikka NTT	SMAN 1 Maumere NTT
11	Maluku / Kota Ambon	TK Al Fatah Ambon	SDN SPG 1 Ambon	SMPN 17 Ambon	SMAN 12 Ambon
12	Papua Barat / Kab. Rajaampat	TK Waisai Rajaampat	SD YPK Marthen Luther Rajaampat	SMPN 4 Rajaampat	SMAN 1 Rajaampat

## 2. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Event Sail Selat Sabang Sebagai tindaklanjut terbitnya SKEP Menko Maritim.

Penyelenggaraan Sail Sabang 2017 didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 28 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016. Berbeda dengan pelaksanaan Sail sebelumnya, pada pelaksanaan Sail Sabang 2017 ketua pelaksana adalah Kementerian Pariwisata dan Koordinator Pengarah adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman. Agenda pengendalian berupa rapat-rapat baik yang bersifat koordinasi dan teknis dalam rangka menyukseskan pelaksanaan. Sepanjang tahun 2017 dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang K/L terkait, pemerintah daerah dan EO kegiatan sail.

Tabel 9. Rangkaian Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Sail Sabang 2017

No	Kegiatan	Waktu	Hasil
1	Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga di Kemenko Kemaritiman	26 -01- 2017	Penetapan jadwal pelaksanaan, logo sail, pembuatan website, pembagian tugas dengan panitia daerah, serta persiapan jalur dan jumlah kapal atau yacht
2	Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Sari Pan Pasifik	29 -03-2017	Pembahasan peningkatan infrastruktur pendukung sail, hotel VIP, dukungan kapal, pembenahan objek wisata saat sail baik di Aceh dan Sabang, koordinasi dengan aparat TNI
3	Rapat Koordinasi Bidang Teknis di Kemenko Kemaritiman	18 -04- 2017	Laporan progress tiap bidang, kepanitiaan daerah, dan penyiapan anggaran Sail Sabang
4	Rapat Teknis Optimalisasi Persiapan Penyelenggaraan Sail Sabang 2017 dengan Dukungan BUMN	20-07-2017	Rencana pelepasan satuan tugas Sail Sabang, identifikasi BUMN yang akan mendukung
5	Rapat Koordinasi tingkat K/L terkait Kesiapan Sail Sabang 2017 di BPPT	12-09-2017	Persiapan pelaksanaan acara puncak, penyiapan akomodasi peserta dan pengunjung sail, dukungan kapal TNI AL, kapal kemenhub jenis ro ro, dukungan Bus, dan mobilisasi pasukan pengamanan TNI AL

6	Rapat Koordinasi Penyiapan Acara Puncak Sail Sabang 2017 di Kemenko Kemaritiman	15-09-2017	Penyiapan fasilitas acara puncak tanggal 2 sept 2017, koordinasi dengan media penyiaran, pembuatan buku rundown, kemenpar memohon kehadiran Presiden RI pada acara puncak.
---	---	------------	--

### 3. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 dalam Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih

#### Gerakan Indonesia Bersih (GIB)

Tujuan Gerakan Indonesia Bersih adalah:

- a. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas yang ditunjang oleh penyediaan dan sinergitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat.
- b. Menciptakan persepsi yang sama mengenai pengelolaan sampah oleh masyarakat, para pengambil keputusan di tingkat nasional dan daerah.

Gerakan Indonesia Bersih memiliki dua fokus, fokus pertama adalah kepada masyarakat melalui program bank sampah dengan harapan masyarakat meningkat pengetahuannya tentang lingkungan bersih, pengelolaan sampah, pembentukan bank sampah dan nilai ekonominya. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengolahan sampah melalui kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat. Fokus kedua adalah kepada pemerintah agar dapat mewujudkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab (pembuatan dan penegakan peraturan, pembentukan kelembagaan, pendidikan dan intervensi aspek sosial budaya, penganggaran pendanaan, serta mendorong dan mempromosikan teknologi tepat guna). Kedua fokus tersebut dapat terlaksana dengan adanya pemahaman prinsip 3R yaitu *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* dan lima aspek pengelolaan sampah yaitu penampungan sampah (skala rumah tangga), pengumpulan sampah (pola individual dan komunal), pemindahan sampah (depo), pengangkutan sampah (TPA/TPS) dan pembuangan akhir sampah.



### Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih pada Kementerian/Lembaga/Dunia Usaha

Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih di Indonesia selama Tahun 2017 sudah memperlihatkan hasil yang sangat baik, dibuktikan dengan keterlibatan yang sangat aktif dari kemeterian/lembaga/dunia usaha/pemerintah daerah/pemerintah kabupaten dan kota pada setiap event selama tahun 2017.

Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Bersih selalu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan Geriakan Indonesia Bersih. Kegiatan yang dilakukan adalah lebih kepada Sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai Agen Perubahan, antara lain : anak sekolah (SD, SMP, dan SMA serta Perguruan Tinggi), kelompok pemuda, LSM, dan komunitas.

Pelaksanaan kegiatan Gerakan Indonesia Bersih oleh kementerian dilakukan secara bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain juga bersama dengan Pemerintah Daerah.

Sebagai coordinator Gerakan Indonesia Bersih, Kemenko Maritim juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga di bawah koordinasi untuk secara bersama melakukan kegiatan dimaksud. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan kegiatan Gerakan Indonesia Bersih dengan nama (GITA LAUT), Kementerian Pariwisata dengan Sapta Pesona, Kementerian Perhubungan dengan melakukan aksi bersih di lokasi pelabuhan, terminal, stasiun, dan tempat umum lainnya. Kementerian tersebut selama Tahun 2017 telah melakukan kegiatan aksi Bersih dan Sosialisasi sesuai dengan TUPOKSI masing-masing, sebagai berikut :

Tabel 10. Kementerian/Lembaga, komunitas serta pemda yang melaksanakan aksi bersih Sepanjang Tahun 2017

No	Kegiatan	Lokasi	Keterlibatan	Peserta	Keterangan
1.	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	Kawasan TPI dan Pelabuhan Feri	Guru SMP, SMA, dan SMK, IWP, Trash Hero	400 org	Tanggal 27 s/d 28 September 2017
2.	Kota Batam, Kepulauan Riau	Pantai Payung, Kampung Melayu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa	Nelayan, Masyarakat dan Pemda	300 org	Tanggal 20 Oktober 2017

3.	Kota Cirebon	Taman Wisata Pantai Kejawan, Kota Cirebon	Guru SMA, Mahasiswa dan Masyarakat	450 org	Tanggal 26 s/d 27 Oktober 2017
4.	Kabupaten Wakatobi	Kampung Bajo Mola Raya	SKPD Kab. Wakatobi, KKP, kementerian dan lembaga	450 org	Tanggal 9 November 2017
5.	Tanjung Bena dan Kota Denpasar, Bali	Pantai Bali Coral, Tanjung Bena	SKPD, Nelayan, Pelaku Wisata, KKP	250 org	Tanggal 24 November 2017
6.	Kota Denpasar	Pantai Merthasari	SKPD, Pelaku Wisata, dan masyarakat	300 org	Tanggal 26 November 2017

Dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih yang merupakan amanat dari Inpres tersebut, ada beberapa Rekomendasi yang disampaikan dalam upaya mempercepat Pelaksanaan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tersebut sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Menteri Koordinator Kemaritiman tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih yang merupakan amanat dari Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017 - 2019;
2. Memperkuat Payung Hukum dan Meningkatkan penegakan hukum yang didukung oleh system, tata kelola penyelenggaraan Negara;
3. Menguatkan rasa memiliki semangat perubahan khususnya budaya bersih;
4. Membentuk simpul-simpul perubahan dalam gerakan untuk membangun inisiatif dan partisipasi semua pelaku agen perubahan;
5. Melakukan praktek keteladanan berbasis nilai-nilai Revolusi Mental di semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan;
6. Meningkatkan pelibatan dan penggunaan media yang efektif melalui portal dan media lainnya yang sesuai dengan kelompok sasaran;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersih



#### 4. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM dan Inovasi Iptek Bidang Perikanan

Sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industry perikanan, Menko Kemaritiman bertanggungjawab dalam mengkoordinir kegiatan percepatan dan peningkatan jumlah sumberdaya manusia yang kompeten, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM perikanan adalah dengan melakukan

Saat ini, diperkirakan setiap tahun lebih dari 24.000 nyawa hilang di seluruh dunia selama operasi penangkapan ikan yang merupakan catatan yang paling menyedihkan. IMO menyadari perlunya tanggapan terhadap krisis keselamatan di industri perikanan dan memiliki sejumlah instrumen untuk menangani masalah ini. Salah satu instrumen tersebut adalah Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Pencetakan untuk Personil Kapal Perikanan (STCW-F), yang diadopsi oleh IMO pada tahun 1995, dan diharapkan dapat membawa manfaat dan keuntungan yang cukup besar bagi industri perikanan yaitu memperbaiki kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada personil yang dipekerjakan di kapal penangkap ikan; dan meningkatkan standar pelatihan dan keselamatan di industri perikanan dan armada kapal penangkap ikan.

Konvensi STCW-F akan berkontribusi pada pengurangan korban jiwa, dan akan terus memperbaiki catatan keselamatan industri perikanan global yang langka ini. Konvensi STCW-F akan berlaku untuk kapal penangkap kapal laut dengan kapal sepanjang 24 meter dan di atasnya.

**Sasaran Strategi :**

- **Terselenggaranya Aksi/Kegiatan Pengembangan Wawasan Kemaritiman (Revolusi Mental di Bidang Kemaritiman)**

### 3.1.5. Peserta yang berpartisipasi dalam program peningkatan wawasan kemaritiman (revolusi mental)

#### a. Maritim Untuk Anak Indonesia (MUAI)

Pelaksanaan peningkatan wawasan kemaritiman sebagai arahan Revolusi Mental menargetkan jumlah peserta yang berpartisipasi sebanyak 4000 orang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan penguatan wawasan kemaritiman (MUAI dan literasi maritim) dengan jumlah peserta yang terlibat sebanyak 1000 orang serta kegiatan penguatan wawasan kemaritiman (ENJ 2017) dengan peserta yang terlibat sebanyak 3000. Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I masih pada persiapan dan rapat koordinasi kementerian/lembaga yang terkait seperti kemendikbud. Sedangkan kegiatan ENJ (Ekspedisi Nusantara Jaya 2017) juga masih pada tahap koordinasi dan sinkronisasi dengan TNI AL yang merupakan mitra utama dalam kegiatan ini. Beberapa tahapan yang telah dilalui misalnya rapat koordinasi untuk memantapkan kerjasama dengan menggunakan Kapal Latih Dewa Ruci.



Peserta yang terlibat dalam kegiatan peningkatan wawasan kemaritiman sebanyak 500 orang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Maritim Untuk Anak Indonesia (MUAI) pada tanggal 23-24 Mei 2017.

Kegiatan pada hari pertama dilaksanakan secara paralel/bersamaan di 3 lokasi dengan mempertimbangkan jumlah dan asal peserta, dengan pengaturan sebagai berikut:

- Lokasi di SD 03 Cilincing, untuk 200 orang peserta yang berasal dari SD di sekitar lokasi
  - Lokasi di SD 01 Kalibaru, untuk 200 orang peserta yang berasal dari SD di sekitar lokasi
  - Lokasi di Aula Kelurahan Cilincing, untuk 100 perwakilan orang tua

Kegiatan hari kedua, sebanyak 400 siswa SD beserta guru pendamping, kepala sekolah dan perwakilan orang tua melaksanakan pengenalan dunia kemaritiman secara

langsung melalui kunjungan ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk mengenal secara langsung wahana pendidikan yang terkait kemaritiman, antara lain: museum transportasi, museum IPTEK, anjungan provinsi dan Theatre IMAX-Keong Emas.

Selama kegiatan kunjungan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai potensi kemaritiman Indonesia yang begitu luar biasa, melihat langsung sarana/prasarana transportasi darat, laut dan udara, mengenal dasar-dasar serta fenomena ilmu dan teknologi yang disajikan secara ringan dan menyenangkan. Di Theatre IMAX - Keong Emas, peserta diperkenalkan dengan tayangan film tentang keindahan alam, keanekaragaman budaya dan potensi maritim kepulauan Raja Ampat.



Gambar. Para siswa beserta para guru pendamping Kegiatan MUAI berpose bersama di Pelataran Wahana Keong Emas- TMII Jakarta.

#### **b. Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2017**

Dalam rangka mendorong peningkatan wawasan kemaritiman untuk mencapai visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaksanakan kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ). Kegiatan tersebut melibatkan para pemuda, mahasiswa dan siswa-siswi tingkat SLTA dari seluruh Indonesia. Ekspedisi Nusantara Jaya terbagi dalam 2 (dua) jenis kegiatan, yakni Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) Kapal Perintis dan ENJ Kapal TNI Dewa Ruci.

### a. Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) Kapal Perintis

Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) Kapal Perintis merupakan kegiatan yang melibatkan pemuda dan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk memasuki pulau-pulau terdepan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah, sebagai berikut:

- Menggali potensi generasi muda Indonesia
- Melatih Kepemimpinan dan Kepedulian Sosial
- Menerapkan Bela negara dan Cinta Tanah Air
- Mengenalkan Budaya Kemaritiman di pulau-pulau terdepan Indonesia
- Meningkatkan wawasan kemaritiman bagi generasi muda melalui aksi nyata program-program kegiatan social kemasyarakatan, pendidikan, pelatihan dan kesehatan.



Jumlah peserta pada kegiatan ENJ ini sebanyak 3.005 orang yang terdiri dari 1.154 orang adalah peserta mahasiswa, 1.608 orang peserta hasil seleksi, 123 orang peserta dari komunitas pemuda dan

120 merupakan peserta Alumni ENJ tahun sebelumnya. ENJ Kapal Perintis ini memiliki 115 titik lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya kegiatan tersebut, para pemuda dan mahasiswa yang ikut serta dapat menciptakan persatuan antar pemuda di Indonesia dan marik minat generasi muda terhadap dunia kemaritiman.

*b. Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) KRI Dewa Ruci*

Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) KRI Dewa Ruci merupakan kegiatan yang melibatkan pelajar tingkat SLTA dari seluruh Indonesia. Kegiatan ENJ KRI Dewa Ruci ini melaksanakan misi pelayaran dengan rute Jakarta-Batam-Sabang-Belawan-Jakarta menggunakan kapal layar tiang tinggi KRI Dewa Ruci



selama 30 hari pada tanggal 16 November – 15 Desember 2017. Jumlah peserta pada kegiatan ini sebanyak 68 orang yang berasal dari perwakilan pelajar 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebelum melaksanakan pelayaran, peserta mendapatkan materi pembekalan mengenai kemaritiman. Kegiatan ENJ KRI Dewa Ruci ini bertujuan untuk :

- Menggali potensi kemaritiman generasi muda khususnya pelajar SMA
- Melatih kepemimpinan
- Menerapkan bela negara dan cinta tanah air
- Memperkuat persatuan dan kesatuan
- Mengenalkan budaya dan pariwisata
- Meningkatkan wawasan kemaritiman dan menarik minat generasi pelayaran dengan menggunakan kapal layar tiang tinggi

Peserta yang berpartisipasi dalam Ekspedisi Nusantara Jaya tahun 2017 jauh lebih banyak dari jumlah peserta yang menjadi target renstra yakni sebanyak 1500 orang. Kenaikan jumlah peserta ini dimungkinkan karena dukungan dari dunia akademik yang mendorong para mahasiswanya terlibat dalam ekspedisi dengan memberikan fasilitas dan mediasi, juga karena dukungan mitra lain seperti BUMN/D dan K/L terkait. Selain itu dukungan anggaran yang signifikan dari kedeputian dikarenakan suksesnya penyelenggaraan Ekspedisi Nusantara Jaya Tahun 2016.

### **3.1.6. Jumlah Event Nasional Wisata yang Dikoordinasikan (Revolusi Mental)**

Revolusi mental terkait event wisata nasional yang dikoordinasikan oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2017 sebanyak 5 event yakni:

1. Anugerah Budaya Maritim
2. Lomba Seni Cinema Maritim)
3. Festival Budaya Kemaritiman
4. Multievent Olahraga Maritim
5. Sail Sabang 2017

Pelaksanaan event wisata nasional dimaksudkan mendukung makin berkembangnya event dan

destinasi pariwisata baru dengan atraksi budaya maritime. Selain mendukung penambahan atraksi wisata, diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini dapat memupuk kesadaran dan meningkatkan karakter bangsa bahari generasi muda. Selain itu kegiatan ini juga dalam upaya mendorong pemenuhan target kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia tahun 2019 sebanyak 20 juta orang.



#### a. Anugerah Budaya Maritim dan Festival Film Pendek Kemaritiman



Malam Anugerah Budaya Maritim Indonesia 2017 diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada para Pemenang Festival Film Pendek Kemaritiman dan Festival Film Dokumenter Pelajar 2017 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) dan

Kemendikbud.

Festival film pendek dan film dokumenter ini diselenggarakan guna menantang generasi muda untuk lebih cermat dengan lingkungan sekitar, mampu menggali ide kreatif, sekaligus mengasah keterampilan membuat film bertemakan kemaritiman, sedangkan tujuan Kompetisi ini adalah untuk menguatkan kembali kesadaran maritim generasi muda

“Film juga merupakan the extensions of man atau perpanjangan pancaindra kita. Ketika mata kita tidak menjangkau kedalaman dasar laut, melalui sebuah film kita dapat menikmati indahnya alam maritim kita yang indah luar biasa,” sehingga



kegiatan dengan nilai kompetisi kreatif seperti ini bisa menumbuhkan kecintaan pada budaya maritim sekaligus menjadi media pembelajaran bagi generasi muda dan para pelajar untuk berpikir kritis dengan menjaga nasionalisme.

Film sebagai media komunikasi massa berperan penting bagi pengembangan strategi budaya, peningkatan ketahanan nasional dalam pembangunan nasional, sarana pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta wahana pengembangan potensi diri, dan pembinaan akhlak.

#### **b. Lomba Seni Cinema Maritim**

Melalui Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, salah satu diantara 7 Pilar kebijakan kelautan Indonesia adalah Budaya Bahari yang bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari. Sesuai Perpres dimaksud, program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan budaya bahari yang berkaitan dengan Lomba Film Pendek adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara kesatuan RI sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional
- c. Membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari



Berdasarkan program-program utama tersebut, Lomba Film Pendek yang bertema maritim ini akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata, dan tujuannya

didesain agar sinergis dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Perpres dimaksud. Adapun tujuan Lomba Film Pendek adalah:

- Mendorong partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam upaya penguatan jati diri sebagai bangsa bahari
- Sebagai bagian dari upaya meningkatkan wawasan kemaritiman, budaya dan karakter bahari
- Mendorong peningkatan upaya-upaya dalam pengembangan potensi dan promosi wisata bahari Indonesia
- Mendorong peningkatan peran dan kreatifitas bidang film pendek dokumenter dalam bidang kemaritiman



Lokasi pelaksanaan kegiatan lomba mencakup peserta dari seluruh wilayah RI.

Melalui media Lomba Film Pendek bertema "Potensi Kemaritiman Indonesia" dan "Selamatkan Laut Kita", hasil lomba berupa film-film terbaik dan terfavorit dapat menjadi bahan dalam penyebaran informasi dan edukasi budaya bahari kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk seperti media sosial dan media lain seperti poster/leaflet, sehingga dampak kegiatan ini dapat berdampak luas. Disamping itu, hasil-hasil Lomba Film Pendek dapat dimanfaatkan dalam skala yang lebih luas antara lain dapat digunakan sebagai media sosialisasi dan edukasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan bahkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

### c. Festival Budaya Kemaritiman

Festival Syukuran Laut Kepulauan Seribu pada tanggal 11-13 Mei 2017. Tujuan pelaksanaan event dalam rangka mengembangkan potensi budaya maritim untuk kegiatan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Kepulauan Seribu. Selain festival syukuran laut juga dilaksanakan FGD Budaya dengan tema Pengembangan Budaya Maritim dalam rangka Mendukung KSPN Kepulauan Seribu. Festival budaya ini dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman bersama Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kementerian Pariwisata, Pemda DKI Jakarta, BI, KLHK-Balai Konservasi Kepulauan Seribu dan beberapa lembaga swadaya masyarakat.



Gambar 3. Perahu yang digunakan dalam Festival Syukuran Laut Pulau Seribu 13 Mei 2017

#### d. Multievent Olahraga Bahari

Pariwisata adalah salah satu sektor penggerak utama pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kedepan pariwisata menjadi sektor unggulan, khususnya dalam hal meningkatkan promosi destinasi dan investasi kepariwisataan demi memacu pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan usaha dan infrastruktur. Pariwisata telah mengalami perkembangan ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia termasuk di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat penting dan strategis pembangunan pariwisata, Presiden RI telah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas melalui Amanat Presiden melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pariwisata dan arahan Presiden pada sidang kabinet awal tahun pada 4 Januari 2016, tentu selain 10 Destinasi prioritas tentu diharapkan juga destinasi-destinasi lainnya seperti Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku pada umumnya serta pemerintah daerah di wilayah Maluku kepulauan khususnya didorong membangun ekonomi lokal dan mengangkat kesejahteraan rakyat. Tour de Moluccas akan memberikan motivasi datangnya wisatawan. Kemajuan pariwisata akan menarik kemajuan sektor lainnya. Pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten perlu memacu kemajuan sektor-sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi mata pencarian utama masyarakat setempat agar kemajuan pariwisata berdampak nyata terhadap masyarakat setempat. Dengan konsep sport tourism, Tour de Moluccas akan mendorong tiga hal penting yakni, sport / race untuk mengangkat/promosi pariwisata Maluku, tourism untuk pengembangan dan eksploras destinasi wisata, serta development untuk pengembangan infrastruktur.

Kegiatan Tour de Moluccas berlangsung dari tanggal 18 – 22 September 2017 dari Piru – Masohi – Wahai – Bula – Wahai – Masohi – Kairatu – Latulahat – Ambon Loop. Yang diikuti peserta dari:

Peserta kegiatan Tour de Moluccas terdiri atas:

- 1) Racer – 25 Negara terdiri dari : 11 Asia, 9 Eropa, 2 Afrika, 2 Oceania dan 1 Amerika;
- 2). Peserta Touring;
- 3). Utusan sponsor;
- 4). Awak media dari dalam dan luar negeri (terlampir);
- 5). Dokter dan team pendukung;
- 6). Panitia: EO, IGP, UCI, PLN;
- 7). Pemerintah Pusat (Kemenko Maritim, Kementerian Pariwisata, Kementerian PU PERA, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo);
- 8). Pemerintah Provinsi Maluku;
- 9). Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku.

Jenis Kegiatan Tour de Molvccas dibagi dalam beberapa bagian antara lain Race, touring, sosialisasi Gerakan Indonesia Bersih bagi komunitas/relawan dalam rangka mendukung Tour de Molvccas sebanyak 150 orang.

#### **e. Sail Sabang 2017**

Sail Sabang merupakan seri penyelenggaraan Sail Indonesia ke-9, dimana sail pertama adalah Sail Bunaken di Manado tahun 2009, diikuti Sail Banda 2010, Sail Wakatobi Belitong 2011, Sail Morotai 2012, Sail Komodo 2013, Sail Raja Ampat 2014, Sail Teluk Tomini 2015, dan Sail Selat Karimata 2016.

Sebagaimana penyelenggaraan 8 sail sebelumnya, Sail ke-9 ini memiliki tujuan utama yang berbeda dari sail sebelumnya yakni lebih fokus pada pengembangan destinasi wisata, dibandingkan sail-sail sebelumnya pada percepatan pembangunan infrastruktur daerah, sehingga pemilihan lokasi acara puncak sail, difokuskan ke daerah wisata yang sudah memiliki relatif infrastruktur cukup, dengan dukungan kegiatan atraksi dan promosi, kawasan ini akan dapat berkembang lebih cepat.



Oleh karenanya, pemerintah terus bergerak aktif mengembangkan dan memperkenalkan pariwisata Indonesia melalui program Wonderful Indonesia, dengan memperkuat event nasional mendukung Sail Sabang 2017. Penyelenggaraan sail dimulai sejak pelepasan Sail Indonesia di Darwin

Australia pada minggu ke-4 Juli 2017, dan berlangsung hingga 5 Desember 2017 di Kota Sabang Aceh. Puncak penyelenggaraan tanggal 2 Desember 2017. di Container Terminal (CT) 3 di Pelabuhan Sabang.

Salah satu event utama sail adalah penyelenggaraan *Yacht Rally* yang diikuti sekitar 100 yacht, berasal dari berbagai negara seperti Australia, Selandia Baru, Japan, Perancis, Jerman, Italia, Swiss, AS, Korea, Malaysia, Singapore, Kanada dan lainnya. Perjalanan para yachter dimulai dari Darwin Australia menuju Kupang sebagai pelabuhan masuk di Indonesia untuk kelompok Sail Indonesia menuju Sabang dan dari Townsville menuju Tual sebagai pelabuhan masuk untuk kelompok Sail Indonesia menuju Sabang. Berbagai daerah destinasi wisata di Indonesia yang dilalui para yachter sebelum mencapai Sabang, seperti Kupang, Tual, Buru, Alor, Maumere, Komodo, Buton, Bali, Banyuwangi, Karimun Jawa, Kumai, Belitung, dan Bintan. Selama persinggahan para yachter di berbagai tempat ini, mereka disambut dengan antusias dengan keramahan masyarakat lokal, sehingga memberikan apresiasi positif bagi masyarakat di setiap lokasi persinggahan mereka.

Yang menarik dalam event sail sabang kali ini adalah adanya keikutsertaan tiga (3) kapal layar tiang tinggi, dua milik Indonesia dan satunya milik Malaysia (Lily Marlene). Dua kapal layar tiang tinggi Indonesia adalah kapal latihan milik TNI-AL, yakni **KRI Dewaruci** yang mengemban misi Ekspedisi Nusantara Jaya Kemenko Kemaritiman dengan membawa 68 pelajar SMA dari 34 provinsi. Selama pelayaran dengan kapal ini, para pemuda dari seluruh Indonesia dididik tentang wawasan kemaritiman, bela negara, persatuan nasional dan mengunjungi objek-objek wisata nasional di setiap lokasi persinggahan. Sementara **KRI Bima Suci**, sebuah kapal baru yang didatangkan dari Spanyol yang menggantikan KRI Dewaruci sebagai kapal latihan bagi para taruna

Akademi Angkatan Laut (AAL) membawa 119 kadet/taruna. Kedua kapal layar ini dilepas secara resmi pada tanggal 20 November lalu bersamaan dengan kapal rumah sakit KRI dr. Soeharso dan KRI Banda Aceh yang membawa Tim ekspedisi Pelayaran Lingkar Nusantara ke VII yang diikuti 400 pramuka saka bahari dibawah koordinasi TNI-AL dan ekspedisi Bela Negara yang membawa 300 peserta dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Selama berada di kota Sabang, peserta Ekspedisi Nusantara Jaya dari KRI Dewaruci dan para kadet AAL dari KRI Bima Suci ikut meramaikan karnaval Sail Sabang, serta melakukan sosialisasi kegiatan ke sekolah-sekolah di Sabang. Sementara Operasi Bakti Surya Bhaskara Jaya yang dikoordinir oleh TNI-AL dengan menggunakan KRI dr. Soeharso ikut ambil bagian dalam operasi bakti kesehatan di pulau Aceh, dan sebagai rumah sakit bergerak untuk mendukung kegiatan kejuaraan free diving internasional.

Tabel 12. Rangkaian Kegiatan Sail Sabang 2017

Rangkaian Kegiatan Sail Sabang 2017	Peserta
Jambore IPTEK	Melibatkan 1000 peserta
International Free Diving Champhionship	Diikuti oleh 40 peserta internasional, dan dua orang pemegang rekor dunia
Karnaval dan Tari Kolosal Masal	melibatkan 400 pelajar se kota Sabang
International Aerobatic Show	- 1 Cruise Ship (Cruise Costa Victoria) dengan 2200 penumpang
Sabang Bazaar	Kegiatan pameran berbasis UKM dengan memamerkan berbagai jenis kerajinan, makanan dan minuman khas Aceh.
Eksebisi Kite Surfing	Diperkirakan 20.000 pengunjung, dengan jumlah wisman sebanyak 3.000 orang.
Kapal Pemuda Nusantara	Dikoordinir oleh Kemenpora
Festival Kopi dan Kuliner Aceh	Menyajikan aneka makanan dan minuman khas Aceh
Seminar Wisata Bahari	
Lomba Video Drone dan Foto Bawah Laut	
Bakti Sosial	Pemeriksaan Kesehatan di P. Aceh
Ziarah ke Makam Malahayati dan Pulau Banyak	

Tabel 13. Capaian Pelaksanaan Sail Sabang 2017 terdapat hal yang berbeda diantaranya:

Capaian	Kegiatan
Jumlah Kapal Peserta Terbesar (125 kapal)	- 13 KRI ikut ambil peran
	- 1 Kapal Research Baruna Jaya VIII milik LIPI
	- 3 Tall Ship (KRI Bima Suci, KRI Dewa Ruci, Lily Marlene/Malaysia)
	- 1 Cruise Ship (Cruise Costa Victoria) dengan 2200 penumpang
	- 100 yachts dari 18 negara
Jumlah Pengunjung Terbesar	Diperkirakan 20.000 pengunjung, dengan jumlah wisman sebanyak 3.000 orang.
Jumlah Event Terbanyak	26 event pada rangkaian kegiatan Sail Sabang 2017.
Manfaat Lanjutan	Dicanangkan Diamond-Triangle Regatta Saphula (Sabang-Phuket-Langkawi) pada tahun 2018

### 3.1.7. Jumlah Peserta yang Terlibat dalam Gerakan Aksi Bersih (Revolusi Mental)

Pada sasaran revolusi mental dengan indikator meningkatnya etos kerja terkait perilaku hidup bersih dan sehat dari baseline 30% pada tahun 2016 ditargetkan mencapai 80 persen sampai tahun 2019. Kementerian Koordinator Kemaritiman mencoba mendorong peningkatan perilaku hidup bersih ini melalui sosialisasi dan aksi dengan Gerakan Budaya Bersih dan Senyum sejak tahun 2016.

Sebagai amanah dari Inpres Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Revolusi Mental, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Program Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat



Indonesia yang bersih. Target jumlah peserta yang terlibat dalam gerakan budaya bersih dan senyum tahun 2017 sebanyak 5000 orang, namun dalam pelaksanaannya terjadi peningkatan jumlah peserta sebanyak 15.852 peserta atau terjadi peningkatan sebanyak 317%. Tingginya kenaikan peserta ini karena partisipasi aktif dari berbagai komunitas, lembaga, pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi bersih di daerah

masing-masing. Untuk beberapa event, Kementerian Koordinator kemaritiman hadir sebagai narasumber pada kegiatan atau aksi bersih yang dilakukan.

Program Gerakan Indonesia Bersih, difokuskan kepada: a). peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan, keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas; b). peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat; c). pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik; d). penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); e). pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah; f). mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan g). peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.



Selama tahun 2017, Gerakan Aksi Bersih pada berbagai lokasi telah diikuti peserta terdiri dari murid SD, SMP, guru, komunitas dan warga. Pada pelaksanaan aksi bersih, sebelumnya diadakan sosialisasi pada peserta terkait perilaku hidup yang ramah

lingkungan dan tetap menjaga perilaku hidup sehat dan bersih. Pelaksanaan kegiatan tidak hanya di dengan sekolah formal namun juga dengan lembaga non formal seperti Yayasan Dian Harapan. Sosialisasi juga dilaksanakan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta yang dilaksanakan di Fasifik Mall Jakarta @America.

Sebagai contoh, implementasi Gerakan Indonesia Bersih yang lintas sektoral, tanggal 6 April 2017 dilaksanakan acara puncak aksi dalam rangka memperingati Hari Bumi 2017 dan dilakukan secara serentak di 11 lokasi. Kegiatan ini dipusatkan di TPI Cilincing yang menghadirkan Kemenko Kemaritiman, TNI, Kepolisian, KKP, KLHK, Pemda DKI Jakarta, komunitas dan warga. Kegiatan ini mengusung tema “ **Combating Marine Debris**”. Tema ini sengaja dipilih karena salah satu



masalah utama yang dihadapi oleh ekosistem laut saat ini adalah semakin banyaknya sampah dari daratan (hampir 80%) yang bermuara di laut dan sangat membahayakan kelangsungan kehidupan organisme laut, keselamatan pelayaran, mengganggu kegiatan pariwisata bahari –membahayakan kesehatan manusia karena mengkonsumsi ikan yang telah terkontaminasi micro plastic.

Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah edukasi dan sosialisasi Gerakan Indonesia Bersih pada siswa SD sampai perguruan tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 5 Mei. Jumlah peserta edukasi adalah 3.170 siswa dan educator sebanyak 159 orang. Jumlah sekolah yang terlibat sebanyak 23 SD, 6 SMK/SMA dan 1 Perguruan Tinggi. Pada puncak acara aksi bersih jumlah peserta yang terlibat sebanyak 3.068 orang yang berasal dari 10 Kementerian, 19 komunitas dan 10 stakeholders lain, beberapa duta besar seperti Amerika, Denmark, Belgia.



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Aksi Bersih Combating Marine Debris Sungai Cilincing pada 2-6 Mei 2017

Kegiatan aksi bersih lain yang lintas sektoral adalah dalam rangka Gerakan Indonesia Bersih dilaksanakan di Makassar pada tanggal 5-6 Agustus 2017 diikuti oleh 1.527 peserta dari 22 lembaga. Kegiatan aksi bersih ini dilaksanakan dalam rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang ke 22. Kegiatan yang dilaksanakan adalah edukasi Program Indonesia Bersih pada anak sekolah SD, SMP dan *Island Cleaning; Diving and Snorkling* yang melibatkan warga I pulau. Lokasi pelaksanaan seperti gambar di bawah ini.



Pelaksanaan Aksi Bersih di Pulau Lae-Lae Makassar dalam rangka Hakteknas 2017

#### Sasaran Strategi :

- **Terwujudnya Good Governance**

#### 3.1.8. Dukungan Kesekretariatan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi SDM Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2017, indikator kinerja kedeputian untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik menargetkan nilai Evaluasi AKIP 2016 dengan nilai angka 60 atau kategori CC. Interpretasi dari nilai AKIP ini adalah Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban namun perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Namun, pada penilaian AKIP 2016 oleh APIP Kemenko Kemaritiman didapatkan nilai AKIP adalah 23,59 atau hanya sebesar 39%.

Tabel 14. Persentase Target dan Realisasi sekretariat Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim 2017

Sasaran Program	IKU	Target	Realisasi	Persentase
Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan	1. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa;	3	3	100
	2. Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa	4	4	100
	3. Layanan dukungan kesekretariatan dan fasilitasi pimpinan	1	1	100
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA				100

Data kinerja dukungan kesekretariatan Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim terdiri dari:

- 1) Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran, dan reviu renstra,
- 2) Penyusunan dokumen periodic bulanan, triwulan dan tahunan, pengelolaan kepegawaian, layanan organisasi dan rumah tangga serta
- 3) Layanan kesekretariatan yang terdiri dari dukungan fasilitasi pimpinan dan dukungan kegiatan strategis pimpinan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Sampai dengan tanggal 30 Desember 2017 capaian realisasi anggaran Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim sebesar Rp. **45,758,052,757,-** dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp. **47,854,200,000,-** dengan persentase realisasi sebanyak 95,62 persen. Kontribusi penyerapan anggaran terbesar pada asdep Koordinasi Jejaring Pariwisata Bahari sebanyak 99,35 persen dan terendah pada Asdep Pendayagunaan Iptek sebesar 88,16 persen.

Capaian atau realisasi anggaran Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim pada tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran pada tahun 2016 sebesar 92,87 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,75 persen. Dibandingkan dengan besaran anggaran mengalami kenaikan yakni dari Rp. **42,126,662,000** pada tahun 2016 menjadi Rp. **47,854,200,000** pada tahun 2017 atau terjadi kenaikan 11,9 persen.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Per Asisten Deputy Lingkup Deputy SDM, IPTEK dan Budaya Maritim 2017.

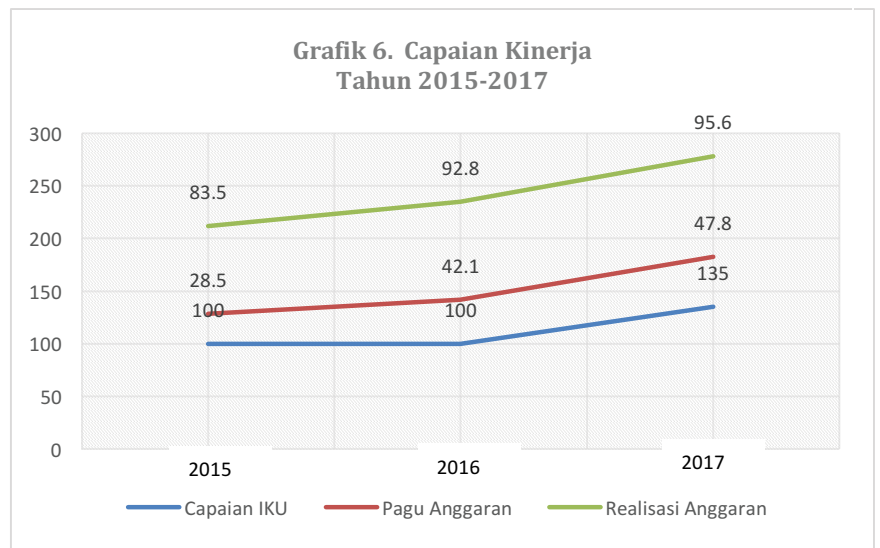
NO	KODE KEG	UNIT KEDEPUTIAN	PAGU	RINCIAN REALISASI	
				TOTAL REALISASI	PRESENTASI
1	5608	Asisten Deputy Koordinasi kebijakan Urusan pendidikan dan pelatihan maritim	16,690,514,000	16,365,623,372	98.05%
2	5761	Asisten Deputy Koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim	10,187,054,000	8,980,860,360	88.16%
3	5762	Asisten Deputy Koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari	6,679,674,000	6,385,763,457	95.60%
4	5763	Asisten Deputy Koordinasi Jejaring Inovasi Maritim	7,189,620,000	7,142,552,636	99.35%
5	5764	Sekretariat Deputy SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	7,107,338,000	6,883,252,932	96.85%
<b>JUMLAH</b>			<b>47,854,200,000</b>	<b>45,758,052,757</b>	<b>95.62%</b>

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja 2015 sampai 2017

Jika dilakukan perbandingan, sejak dari 2015 - 2017 terjadi kenaikan persentase capaian kinerja baik itu capaian IKU, pagu anggaran maupun realisasi penyerapan (Grafik 6 dan tabel 3.3).

Pada tahun 2015 dan 2016 capaian IKU mencapai 100% dan tahun 2017 meningkat sampai 134%. Dari sisi anggaran dan

serapannya juga mengalami kenaikan dari 28,5 M tahun 2015 naik menjadi 47,8 tahun 2017. Daris segi penyerapan anggaran performa Deputi 4 juga makin membaik dari 83,5 naik menjadi 92,8 tahun 2016 dan mencapai 95,6 pada tahun 2017.



Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Mulai Tahun 2015 - 2017

NO	CAPAIAN KINERJA	2015	2016	2017
1.	Capaian IKU (%)	100	100	135%
2.	Pagu anggaran (Rp,000)	28,595,858,	42,126,662,-	47,854,200,
3.	Realisasi penyerapan anggaran (%)	83,57	92,8%	95,6%

Sumber : Lakip Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2015 dan 2016

Lebih spesifik perbandingan IKU dan target reaisasi Capaian Kinerja 2016 dan 2017 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 16. Perbandingan Realisasi 2016 dan 2017.

No	Indikator Kinerja	2016			2017		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah rekomendasi kebijakan Bidang SDM IPTEK dan Budaya Maritim	≥ 8	8	100	8	8	100
2.	Persentase rekomendasi kebijakan Bidang SDM IPTEK dan Budaya Maritim yang ditindaklanjuti	> 50 %	75%	150	50%	50%	100
3.	Jumlah pengendalian implementasi kebijakan Bidang SDM IPTEK dan Budaya Maritim	3	3	100	4	4	100

Sumber : Lakip Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan pengukuran kinerja untuk 7 (tujuh) IKU yang telah ditetapkan, maka pencapaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim pada tahun 2017 adalah sebesar 135% persen. Pencapaian ini didukung oleh input pendanaan atau anggaran sebesar Rp 47,854,200,000,- dengan realisasi sebesar 95,62 persen. Pencapaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2016, baik dari sisi realisasi anggaran maupun indikator kinerja.

Pada table 3.4, untuk kinerja 2015, perbandingan capaian IKU tidak dapat disandingkan karena adanya perubahan format IKU dengan tahun 2016 dan 2017. Namun dari segi jumlah capaian tercapai realisasi sebesar 100 persen. Realisasi anggaran sejak tahun 2015 dari Rp. 28,595,858,000 menjadi Rp. 42,126,662,000 tahun 2016 dan pada tahun 2017 total anggaran adalah 47,854,200,000. Atau terjadi kenaikan rata-rata 37,25 persen dalam dua tahun. Peningkatan ini disebabkan semakin banyak dan kompleksnya isu yang dikelola oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim dan adanya penugasan khusus seperti Gerakan Revolusi Mental melalui Gerakan Indonesia Bersih (GIB) dan Peningkatan Wawasan Kemaritiman.

Dari segi capaian atau realisasi keuangan juga terus mengalami peningkatan, mulai dari 83,57 persen pada tahun 2015, meningkat menjadi 92,8 persen tahun 2016 dan semakin naik menjadi 95,6 persen pada tahun 2017. Kinerja keuangan yang terus membaik disebabkan oleh adanya penambahan SDM yang mutasi dari kementerian/lembaga lain sehingga dukungan administrasi dan pengelolaan kegiatan bisa terlaksana makin baik.

Terjadi peningkatan total kinerja melanjak dari 100 persen tahun 2015 menjadi 135 persen pada tahun 2017, hal ini disebabkan oleh capaian indikator kinerja Gerakan

Indonesia Bersih Melalui Jumlah Peserta yang berpartisipasi pada Gerakan Budaya Bersih dan Senyum. Target yang ditetapkan adalah 5000 peserta namun melonjak menjadi 15.852 orang. Walaupun demikian, pada indikator kinerja jumlah peserta yang terlibat dalam wawawasan kemaritiman hanya tercapai peserta 3.569 orang dari target 4000 orang (89,25%). Tidak tercapainya jumlah peserta ini karena terjadinya efisiensi anggaran lingkup Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim. Meski tidak tercapai kinerja AKIP dan Peserta Wawasan Kemaritiman sampai 100 persen, nilai total kinerja tetap tinggi karena dukungan dari presentasi peserta Gerakan Indonesia Bersih (GIB) melalui Gerakan Budaya Bersih dan Senyum (GBBS)

Pada tahun 2017, indikator kinerja Gerakan Indonesia Bersih masih menekankan pada keterlibatan /jumlah peserta aksi. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan sebanyak mungkin para *Agent of Change* (agen pembaharu) yang sadar akan perilaku hidup bersih dan sehat baik di komunitas, dunia pendidikan, pemerintah pusat dan daerah maupun kementerian lembaga. Para pembaharu ini yang akan menjadi *leader* untuk menjaga lingkungan masing-masing. Pada tahun 2018, formulasi kebijakan yang akan dihasilkan lebih pada pengendalian gerakan indonesia bersih yang telah ada seperti *zero waste event*, Pengelolaan sampah di kantor pemerintah, dan lain-lain.

Secara umum, membaiknya pelaksanaan Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim dibandingkan dengan pelaksanaan tahun 2016 dapat dijelaskan diantaranya:

1. Proses penyusunan perjanjian kinerja telah mengalami penyesuaian dengan dokumen perencanaan lain seperti Prioritas Nasional dalam RKP 2017 dan Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2017
2. Proses pengukuran kinerja lebih terstruktur karena menggunakan aplikasi *Balanced Scorecard* dengan target monitoring setiap 3 bulanan yang dipantau tidak hanya oleh unit kerja eselon II namun juga oleh unit kerja eselon I.
3. Telah ditempatkannya pejabat defentitif pada beberapa bidang atau eselon III yang selama 2 tahun hanya diisi oleh PLT. Hal ini menyebabkan pejabat yang telah defentitif semakin focus melaksanakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Selain itu, walaupun masih terbatas, adanya tambahan PNS mutasi dari instansi lain yang menempati posisi sebagai fungsional umum membantu percepatan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 17. Output dan Mitra terkait Kebijakan Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2017

No	Mitra Kementerian / Lembaga	Kebijakan / Aksi yang Dihasilkan
1	Lintas Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAN Pengelolaan Sampah Plastik di Laut</li> <li>• Draft Perpres Pengelolaan Geopark Nasional</li> <li>• Kurikulum Kemaritiman</li> <li>• Gerakan Indonesia Bersih Melalui GBBS</li> </ul>
2	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Profesi Kemaritiman melalui ratifikasi STCW 1995</li> </ul>
3	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roadmap Energi Arus Laut</li> <li>•</li> </ul>
4	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Permenhub tentang Diversifikasi Pelra untuk mendukung Pariwisata Bahari</li> <li>•</li> </ul>
5	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Sail Sabang 2017</li> <li>• Multy Event Olahraga Bahari</li> <li>• Seni dan Budaya Bahari</li> </ul>
6	Kemendikbud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Kurikulum Kemaritiman</li> </ul>
7	Radio Republik Indonesia Pro 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandiwara Radio Dapunta</li> </ul>



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan realisasi dari kinerja setiap unit organisasi Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang telah diinput dalam aplikasi *Balanced Scorecard* tahun 2017. Diharapkan dengan ketaatan pelaporan kinerja menjadi sumber data dan informasi baik bagi pelaksana kegiatan maupun penanggung jawab sehingga target kinerja yang telah diperjanjikan dapat terpantau progressnya, baik pelaksanaan fisik maupun anggaran. Sehingga target yang telah diperjanjikan sebelumnya dapat dicapai.

Capaian target kinerja Deputy SDM, Iptek dan Budaya Maritim tahun 2017 untuk setiap indikator kinerja utama yang telah diperjanjikan mencapai 100 persen. Sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran pada bulan Agustus 2017 melalui APBN-P dan relokasi anggaran ke Deputy Kedaulatan Maritim menyebabkan adanya perubahan focus kegiatan ke deputian. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan pada tahun mendatang dapat direkomendasikan perbaikan hal-hal seperti:

1. Diperlukan adanya penyempurnaan SOP pengelolaan keuangan lingkup ke deputian sehingga bisa menghindari terjadinya keterlambatan proses administrasi dan keuangan
2. Diperlukan perencanaan yang lebih baik pada setiap level unit kerja sehingga mengurangi revisi yang memerlukan waktu cukup lama untuk tersedianya anggaran dalam DIPA.
3. Sinkronisasi yang lebih baik untuk menindaklanjuti capaian kinerja di Kementerian/Lembaga lain, misalnya penyelesaian Perpres Geopark dan Rancangan Perpres Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Sampah Plastik di Laut yang membutuhkan sinkronisasi di Sekretariat Kabinet.

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek  
dan Budaya Maritim



Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2017.

NO	IKU	SUB IKU	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5			
<b>Customer Perspective</b>							
1.	Persentase rekomendasi kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan (yang ditindaklanjuti)	1. Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan;			√		
		2. Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (Marine Debris);					√
		3. Penguatan Karakter Bangsa Bahari;					√
		4. Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional;			√		
2.	Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan Kebijakan Bidang SDM, Iptek dan Budaya maritim yang dilaksanakan para pemangku kebijakan	1. Hasil Pelaksanaan Kebijakan Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan;					√
		2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional;					√
<b>Internal Process</b>							
3.	Jumlah rumusan/formulasi kebijakan SDM, IPTEK dan Budaya maritim yang dihasilkan	1. Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan;			√		
		2. Rekomendasi Penyusunan Kebijakan Sertifikasi Profesi Kemaritiman;					√
		3. Road Map Pengembangan Energi Arus Laut					√

		4. Rekomendasi Pengelolaan Sampah Plastik di Laut ( <i>Marine Debris</i> );			√	
		5. Rekomendasi Kebijakan Pengenalan Olahraga Bahari Kepada Generasi Muda untuk Mendukung Pariwisata Nasional		√		
		6. Rekomendasi Kebijakan Penguatan Karakter Bangsa Bahari;		√		
		7. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Jejaring Geopark Nasional	√			√
		8. Rekomendasi Kebijakan Diversifikasi Usaha Pelayaran Rakyat dalam Mendukung Wisata Bahari			√	
4.	Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan kebijakan Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	1. Rekomendasi Penerapan Muatan Kemaritiman dalam Kurikulum Pendidikan				√
		2. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan <i>Event</i> Sail Selat Sabang Sebagai Tindaklanjut Terbitnya SKEP Menko Maritim			√	
		3. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres Nomor 12 tahun 2016 dalam Pelaksanaan Indonesia Bersih				√
		4. Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM dan Inovasi Iptek Bidang Perikanan				√
5.	Peserta yang berpartisipasi dalam program peningkatan wawasan kemaritiman		4000 orang	5 0 0		3 5 0 0

6	Jumlah Event nasional yang dikoordinasikan		5 event		1	2	2
7	Jumlah peserta yang terlibat dalam gerakan aksi bersih		5000 orang	5000	1500	1500	1500
<b>Learning and Growth</b>							
8	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						> 60
9	Persentase Penyerapan Anggaran						> 90

Lampiran 2. Target dan Indikator Output Renstra Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2016-2019

No.	SASARAN	INDIKATOR OUTPUT	TAHUN			
			2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim dan tindak lanjut hasilnya	Bahan kebijakan koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim	3	3	3	3
3.	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tindak lanjut hasilnya	Bahan kebijakan koordinasi Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim	3	3	3	3
4.	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Bahari dan tindak lanjut hasilnya	Bahan kebijakan koordinasi Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari	3	3	3	3
6.	Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim dan tindak lanjut hasilnya	Bahan kebijakan koordinasi Jejaring Inovasi Maritim	3	3	3	3
8.	Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	Layanan kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	2	2	2	2

Lampiran 3: Program Prioritas yang didukung oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim pada Rencana Kerja Pemerintah 2017.



## Program Prioritas

1. Penguatan Jatidiri dan Karakter Bangsa
2. Peningkatan Relevansi Pendidikan
3. Konektivitas Laut dan Industri Maritim
4. Peningkatan industri perikanan dan hasil laut
5. Tata ruang laut, konservasi, dan rehabilitasi pesisir dan laut serta wisata bahari
6. Peningkatan peranan EBT dalam bauran energy
7. Promosi Wisata Indonesia
8. Pengembangan 10 destinasi wisata
9. Penciptaan ekonomi local dan sikap masyarakat
10. Produktifitas dan daya saing industry
11. Pembangunan dan pengembangan transportasi laut

Lampiran 4. Sasaran dan Indikator Output Renstra Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Tahun 2016-2019

No.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN			
			2016	2017	2018	2019
1.	<i>Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim dan tindak lanjut hasilnya</i>	Jumlah Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim yang dikoordinasikan	6	6	6	6
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim yang ditindaklanjuti	3	3	3	3
2.	<i>Terwujudnya penguatan karakter bangsa bahari melalui sinergi kegiatan pembinaan SDM generasi muda *)</i>	Jumlah K/L dan/atau BUMN dan/atau Swasta dan/atau Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya	20	30	40	40
		Jumlah pemuda yang terlibat dalam kegiatan Ekspedisi Nusantara Jaya	1,000	1,500	2,000	2,000
3.	<i>Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tindak lanjut hasilnya</i>	Jumlah Kebijakan Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim yang dikoordinasikan	6	6	6	6
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim yang ditindaklanjuti	3	3	3	3
4.	<i>Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Bahari dan tindak lanjut hasilnya</i>	Jumlah Kebijakan Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Bahari yang dikoordinasikan	6	6	6	6
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang M98Budaya, Seni dan Olah Raga Bahari yang ditindaklanjuti	3	3	3	3
5.	<i>Terciptanya kreativitas penyelenggaraan budaya/olahraga bahari yang mendorong penguatan karakter bahari *)</i>	Jumlah Event budaya/olah raga bahari yang dikoordinasikan/ diselenggarakan	5	5	8	8
6.	<i>Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim dan tindak lanjut hasilnya</i>	Jumlah Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang dikoordinasikan	6	6	6	6
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Jejaring Inovasi Maritim yang ditindaklanjuti	3	3	3	3
7.	<i>Terwujudnya penguatan karakter bahari melalui gerakan budaya bersih &amp; senyum pada berbagai jejaring lembaga pusat &amp; daerah *)</i>	Jumlah peserta yang terlibat dalam gerakan budaya bersih dan senyum	1,000	1,000	1,500	1,500
8.	<i>Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim</i>	Penyusunan Rencana, Program dan Anggaran Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	4	4	4	4
		Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim	2	2	2	2

Keterangan : \*) Prioritas Nasional

Lampiran 5. Tabel Komposisi Peserta Ekspedisi Nusantara Jaya 2017.

1	Total Jumlah Peserta ENJ Tahun 2017	3.005	Orang
2	Total Jumlah Peserta Mahasiswa	1.154	Orang
3	Total Jumlah Peserta Pemuda Hasil Seleksi	1.608	Orang
4	Total Jumlah Peserta Komunitas Pemuda	123	Orang
5	Total Jumlah Peserta Alumni	120	Orang

- 3005 ORANG MENINGKAT WAWASAN KEMARITIMANNYA DAN TERCIPTANYA PERSATUAN ANTAR PEMUDA DI SELURUH INDONESIA
- 115 TITIK MISI MENJADI LOKASI KEGIATAN ENJ 2017
- NEGARA HADIR MELALUI GENERASI MUDA DI PULAU-PULAU TERDEPAN NKRI
- ENJ 2017 MENJADI VIRAL DI MEDIA SOSIAL MELALUI INSTAGRAM, YOUTUBE DAN FACEBOOK



1	Total Jumlah Peserta ENJ KRI DEWA RUCI TAHUN 2017	68	Orang
Dari 34 Provinsi dengan masing-masing alokasi 2 orang tiap Provinsinya			

**BERLAYAR**

Program ini akan dilaksanakan pada :

Pelayaran Jakarta – Batam	20 November – 24 November 2017
Pelayaran Batam – Sabang	26 November – 30 November 2017
Pelayaran Sabang – Belawan	4 Desember – 6 Desember 2017

**KEGIATAN DARAT**

Kegiatan di Batam	24 November – 26 November 2017
Kegiatan di Sabang	30 November – 4 Desember 2017
Kegiatan di Belawan	6 Desember – 7 Desember 2017